



**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DAERAH PADA ERA
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Oleh:

**Sri Wahyuningsih
NIM. 140810101144**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DAERAH PADA ERA
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Sri Wahyuningsih
NIM. 140810101144**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Halimah dan Ayahanda Agi tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga.
2. Kedua Saudaraku, Riska Anggraini dan Yunita Tri Rahmadhani, terimakasih atas dukungan selama ini.
3. Bapak/Ibu Guru sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah sabar mendidik dan memberikan ilmunya.
4. Rekan-rekan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Almamater yang aku banggakan UNIVERSITAS JEMBER.

MOTTO

“Jangan melihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan, tetapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran”
(James Thurber)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(QS. Al-Insyirah Ayat 6-8)

“Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kedzaliman dan tenaga badan daripada kelemahan”
(Abu Hamid Al Ghazali)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuningsih

NIM : 140810101144

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2018

Yang menyatakan,

Sri Wahyuningsih

NIM. 140810101144



**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DAERAH PADA ERA
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Oleh

Sri Wahyuningsih
NIM. 140810101144

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Aisah Jumiati, SE., M.P.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Siswoyo Hari Santoso, SE., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi
Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur
Tahun 2012-2016
Nama Mahasiswa : Sri Wahyuningsih
NIM : 140810101144
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 23 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Aisah Jumiati, SE., M.P.

Dr. Siswoyo Hari Santoso, SE., M.Si.

NIP. 196809261994032002

NIP. 196807151993031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes

NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DAERAH PADA ERA
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sri Wahyuningsih

NIM : 140810101144

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

13 Juli 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

- | | | |
|---------------|--|---------|
| 1. Ketua | <u>Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E, M.E.</u>
NIP. 19780414 200112 2 003 | (.....) |
| 2. Sekertaris | <u>Dr. Riniati, M.P.</u>
NIP. 19600430 198603 2 001 | (.....) |
| 3. Anggota | <u>Fajar Wahyu Prianto, S.E, M.E.</u>
NIP. 19810330 200501 1003 | (.....) |

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA
NIP. 19710727199512101

Analisis Pengaruh Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016

Sri Wahyuningsih

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan pelibahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah dalam pengelolaan keuangan secara mandiri. Studi ini mengambil seluruh populasi sebanyak 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan menggunakan data panel. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerimaan daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) pada era desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2012-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah FEM (*Fixed Effect Model*). Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan penerimaan daerah (PAD, DBH, DAU, DAK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun 2012-2016.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Penerimaan Daerah, Data Panel, Model Efek Tetap (FEM).

*The Analysis Of Regional Revenue Effect In The Fiscal Decentralization Era
Towards The Economic Growth In East Java In 2012-2016*

Sri Wahyuningsih

*Development Economics Departement, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

East Java is one of region in Indonesia which imposed fiscal decentralitation policy. It is a regional finance management which are transterred from the central goverment to the local goverment. The population of this study are 38 district in East Jav and used panel data. The purpose of this study is to determine the effect of regional revenue (Local Revenue, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund) in the era of fiscal decentralization on economic growth in East Java in 2012-2016. The analysis method used in this research is FEM (Fixed Effecth Model). The results of this study partially indicated that the variable of Original Regional Revenue have positive and signficant effect to economic growth, the variable of Revenue Share have positive and insignificant effect, the variable of General Allocation Fund have positive and significant influence to economic growth, Special Allocation Fund have positive and significant influence to economic growth . While the results of simultaneously research show the revenue area (PAD, DBH, DAU, DAK) have significant effect on economic growth in East Java in 2012-2016.

Keywords : fiscal decentralization; economic growth; regional revenue; panel data; (Fixed Effecth Model)

RINGKASAN

Analisis Pengaruh Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016; Sri Wahyuningsih, 140810101144; 2018; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016” Desentralisasi fiskal merupakan sebuah kebijakan yang memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur seluruh aktivitas di daerah mulai dari penggalian sumber daya alam yang harus dikembangkan agar menjadi sumber pendapatan daerah sampai dengan sistem penganggarnya. Hal tersebut diikuti dengan penyerahan sebagian kewenangan yang meliputi tugas dan fungsi dari pemerintah pusat kepada daerah. Penyerahan wewenang terhadap pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah untuk mengelolah penerimaan daerah dan mengelola sumber daya alam maupun sumber daya lainnya milik daerah secara mandiri. Sehingga daerah dalam membutuhkan pendanaan yang lebih berimplikasi pada kebutuhan yang akan di transfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diarahkan sebagai pendamping bersamaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kegiatan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu pola dalam menghitung hasil perkembangan kesejahteraan yang diukur dengan besarnya pertumbuhan yang dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa yang memiliki andil yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Kontribusi terhadap perekonomian Jawa Timur terhadap nasional menduduki peringkat kedua setelah Jakarta.

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerimaan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan daerah pada era desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2012-2016 secara bersama dan secara individu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan data panel 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur dan menggunakan *fixed effect model* (FEM).

Hasil penelitian secara individu ini menunjukkan bahwa variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar 0,082468 dan nilai probabilitas 0,0086, variabel DBH (Dana Bagi Hasil) berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,061624 dan nilai probabilitas sebesar 0,1669, variabel DAU (Dana Alokasi Umum) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 0,305948 dan nilai probabilitas 0,0106, dan variabel DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 0,034009 dan nilai probabilitas 0,0038.

Hasil penelitian secara bersama-sama ini menunjukkan variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah), DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), dan variabel DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas $F_{statistik}$ sebesar 0,000000 yang berarti nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikant $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama.

Hasil penelitian nilai koefisien determinasi (R^2) pada model *fixed effect*, yang diperoleh dengan hasil sebesar 0,995383. Artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 99,5 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,5 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima Kasih kepada sang Maha pencipta Allah SWT.
2. Aisah Jumiati, S.E., M.P., selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Siswoyo Hari Santoso, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. Lilis Yuliati S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Dr. Sebastiana Viphindaratin, M.Kes., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;

7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Ibunda Halimah dan Ayahanda Agi yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa;
9. Riska Anggraini dan Yunita Tri Rahmadhani, selaku adik kandung penulis yang telah memberi dukungan;
10. Rekan-rekan terbaik di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2014 Anggi Puspa Pertiwi, Marine Marza Zafira Paradise, Mi'Ilya Khoijah dan Catur Nanda Puspita Sari, terimakasih atas motivasi, diskusi-diskusi dan kenangan selama empat tahun, baik suka maupun duka dalam masa perkuliahan;
11. Rekan-rekan terbaik di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2014 Nana, Tiwi, Silvi, Miya, terimakasih atas motivasi, diskusi-diskusi dan kenangan selama empat tahun, baik suka maupun duka dalam masa perkuliahan;
12. Teman-teman KKN 34 Desa Tenggarang, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, terimakasih untuk 45 hari yang mengesankan;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 18 Mei 2018

Penulis

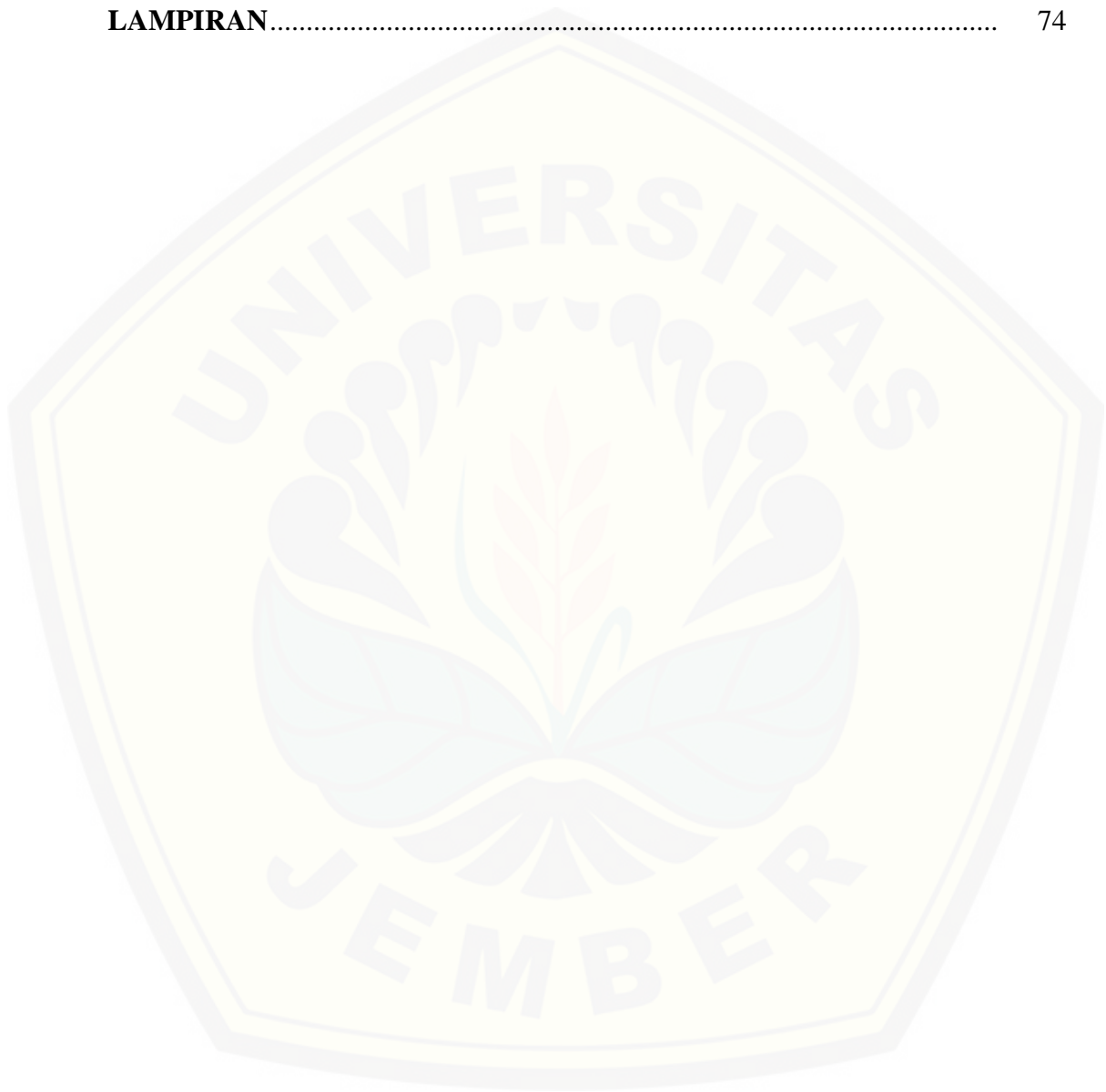
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Otonomi Daerah	10
2.1.2 Desentralisasi Fiskal	11

2.1.3	Teori Federalisme Fiskal (<i>Fiscal Federalism</i>).....	15
2.1.4	Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.5	Dana Alokasi Umum.....	19
2.1.6	Dana Alokasi Khusus	20
2.1.7	Dana Bagi Hasil	20
2.1.8	Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.9	Hubungan Penerimaan Daerah (PAD,DBH,DAU,DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	25
2.2	Tinjauan Penelitian Sebelumnya	26
2.3	Kerangka Koseptual	31
2.4	Hipotesis Penelitian	32
	BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
3.3	Jenis dan Sumber Data	33
3.4	Spesifikasi Model Penelitian	34
3.5	Alat Analisis	35
1.	Metode Regresi Data Panel.....	35
A.	Pemilihan Model Regresi Data Panel	36
a.	<i>Chow Test</i>	36
b.	<i>Hausmant Test</i>	36
B.	Prosedur Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	37
a.	<i>Model Common Effect</i>	37
b.	<i>Model Fixed Effecth</i>	37
c.	<i>Model Random Effecth</i>	38
2.	Uji Statistik	38
A.	Uji F-statistik	38
B.	Uji t-statistik.....	39
C.	Uji Koefisiensi Determinasi (R^2).....	39
3.	Uji Asumsi Klasik.....	40
A.	Uji Multikolinieritas.....	40

B. Uji Heteroskedastisitas.....	41
C. Uji Normalitas.....	42
3.6 Definisi Operasional.....	42
1. Penerimaan Daerah.....	43
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum.....	45
4.1.1 Kondisi Geografis Jawa Timur	45
4.1.2 Kondisi Demografis Jawa Timur	46
4.1.3 Kondisi Perekonomian Jawa Timur	48
4.2 Hasil Analisis Data	51
1. Uji Pemilihan Model	51
A. Hasil Uji Chow	51
B. Hasil Uji Hausman.....	52
2. Hasil Analisis Regresi Data Panel	53
3. Uji Statistik	55
A. Uji F (Uji Signifikasi Simultan)	54
B. Uji t (Uji Signifikasi Parsial)	54
C. Uji Koefisiensi Determinasi (Uji R^2)	55
4. Uji Asumsi Klasik	57
A. Uji Multikolinieritas.....	57
B. Uji Heterokedastisitas	58
C. Uji Normalitas.....	58
4.3 Pembahasan	59
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ..	60
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	61
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	62
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	63
5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	64

BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	28
4.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Persen).....	48
4.2 Hasil Uji Chow	52
4.3 Hasil Uji Hausman	52
4.4 Hasil Regres Data Panel Fixed Effect Model, Variabel Penerimaan Daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)) Terhadap Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).....	53
4.5 Hasil Uji F.....	55
4.6 Hasil Uji t.....	55
4.7 Hasil Uji R^2	56
4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	57
4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58

DAFTAR GAMBAR

1.1 PDRB atas harga konstan 2010 tahun 2012-2016 di 6 provinsi pulau jawa	4
1.2 PDRB Tahun 2012-2016 Di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur.....	5
1.3 Dana Perimbangan Jawa Timur Tahun 2012-2016.....	6
2.1 Kerangka Konseptual	31
4.1 Rata-rata Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Air Laut Di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2016.....	46
4.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Jawa Timur Tahun 2012-2016.....	47
4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Persen).....	50
4.4 Hasil Uji Normalitas	59

DAFTAR LAMPIRAN

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah).....	74
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah)	76
C. Dana Bagi Hasil (DBH) Menurut Kabupaten/kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah)	78
D. Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Kabupaten/kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah)	80
E. Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Kabuapten/kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah)	82
F. Data Perkembangan PDRB, PAD, DBH, DAU, DAK Menurut Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah).....	84
G. Hasil Uji Chow.....	93
H. Hasil Uji Hausman	94
I. Hasil Regresi <i>Model Fixed Effecth</i>	95
J. Hasil Uji Multikolineritas	96
K. Hasil Uji Heroskedatisitas.....	97
L. Hasil Uji Normalitas	98

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki ribuan pulau dengan berbagai perbedaan karakteristik disetiap daerahnya. Perbedaan yang terdapat disetiap wilayah mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam terciptanya pola pembangunan ekonomi di Indonesia yang tidak seragam. Dengan adanya perbedaan dalam kemampuan pembangunan ekonomi akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan maupun ketimpangan keuangan daerah (Hidayat, 2016). Sentralisasi yang dilakukan di Indonesia dianggap kurang efektif sebab perbedaan yang ada pada setiap daerah menyebabkan perbedaan untuk tumbuh menjadi tidak sama, ada beberapa daerah yang mampu tumbuh dengan cepat sementara di daerah lainnya tumbuh lambat. Hal ini menyebabkan munculnya gagasan untuk mendelegasikan beberapa tugas dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang diputuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hidayat, 2016; Oates, 1999). Oleh karena itu, melahirkan Undang-Undang mengenai otonomi daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah yang sekaligus awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah yang telah diberikan wewenang untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum masyarakat dan mampu mengatur maupun mengurus rumah tangganya sendiri (Kurniawan, 2012; Kusuma, 2016).

Era baru desentralisasi di Indonesia penerapannya baru efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Dalam proses pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai penyempurnaan terhadap kedua Undang-undang tersebut. Pada tahun 2004 dikeluarkan UU otonomi daerah yang baru yaitu UU No. 32 tahun 2004 mengganti UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU No. 33 tahun 2004. mengganti UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan baru tersebut Indonesia telah melaksanakan transformasi peraturan pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi.

Peraturan pemerintah tersebut mendorong perluasan wewenang pemerintah daerah serta menciptakan kemandirian terhadap suatu daerah sehingga dalam menjalankan sistem pemerintah atau otonomi daerah diharapkan bisa dijadikan cara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal dengan melalui kebijakan desentralisasi (Kurniawan, 2012; Hidayat, 2016).

Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan strategi yang sangat cocok dalam kondisi pembangunan dan pemberdayaan daerah yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat yang saat ini melakukan perkembangan demokrasi diberbagai aspek. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan asas desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Karena pada dasarnya, desentralisasi diikuti dengan kebijakan fiskal sebagai sarana dalam mendukung pelayanan publik dan transfer dana ke daerah (Taqwa, 2016). Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan sebuah kebijakan yang memberikan wewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur seluruh aktivitas di daerah mulai dari penggalian sumber daya alam yang harus di kembangkan agar menjadi sumber pendapatan daerah sampai dengan sistem penganggarnya. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Undang- Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk deregulasi baru. Dengan adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan lebih fokus dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerjanya secara maksimal. Salah satu cara dalam membantu kinerja pemerintah, khususnya dalam hal kinerja keuangan dengan melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Selain itu, pada dasarnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi ekonomi melalui pemakaian dana APBD yang tepat guna. Karena pemerintah kabupaten/kota lebih mengetahui kondisi kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah secara keseluruhan (Yuana, 2014).

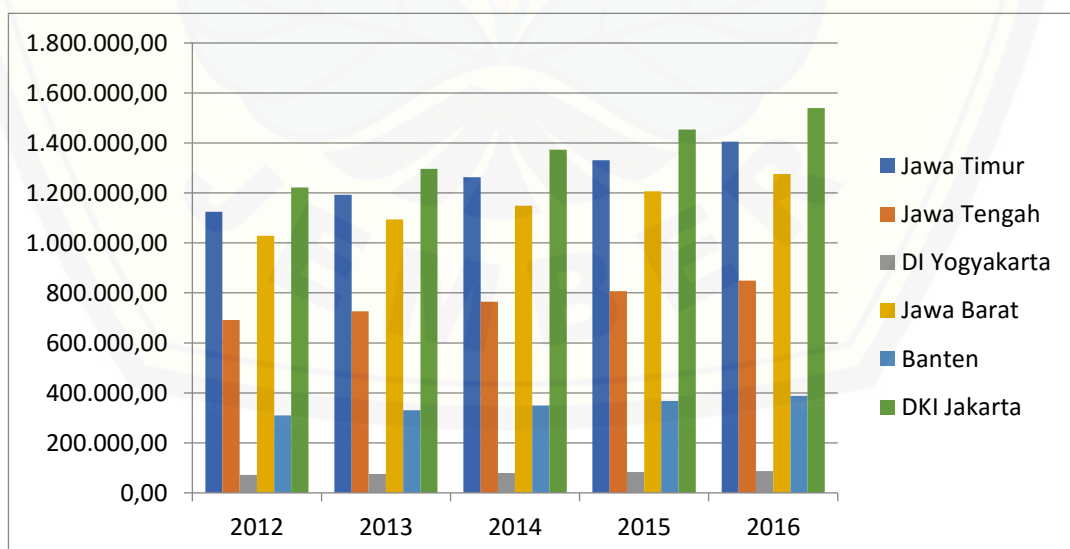
Desentralisasi fiskal merupakan dampak dari adanya wewenang untuk mengelolah keuangan secara mandiri. Apabila, pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dalam pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal tersebut diikuti

dengan penyerahan sebagian kewenangan yang meliputi tugas dan fungsi dari pemerintah pusat kepada daerah. Penyerahan wewenang terhadap pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan daerah dan mengelola sumber daya alam maupun sumber daya lainnya milik daerah secara mandiri. Sehingga daerah dalam membutuhkan pendanaan yang lebih berimplikasi pada kebutuhan yang akan di transfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diarahkan sebagai pendamping bersamaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kegiatan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan tersebut, pemerintah pusat dan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah berubah menjadi daerah otonom. Meskipun telah terjadi adanya pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom, pemerintah pusat tetap berkewajiban untuk melakukan kontrol atas pertumbuhan dan kesejahteraan daerah yang secara agregat berpengaruh kepada perekonomian nasional. Tujuan dari adanya pelimpahan wewenang tersebut yaitu Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan, dan diharapkan tingkat partisipasi publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, pemberian wewenang dan tanggung jawab yang harus diimbangi dengan adanya pembagian sumber penerimaan yang memadai yang mampu mendukung terlaksananya pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal menuntut kemandirian didalam mendanai setiap pengeluaran daerah. Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DHB). Penerimaan daerah pada di era desentralisasi fiskal berdampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang diungkapkan oleh Gunantara dan Dwirandra (2014), namun

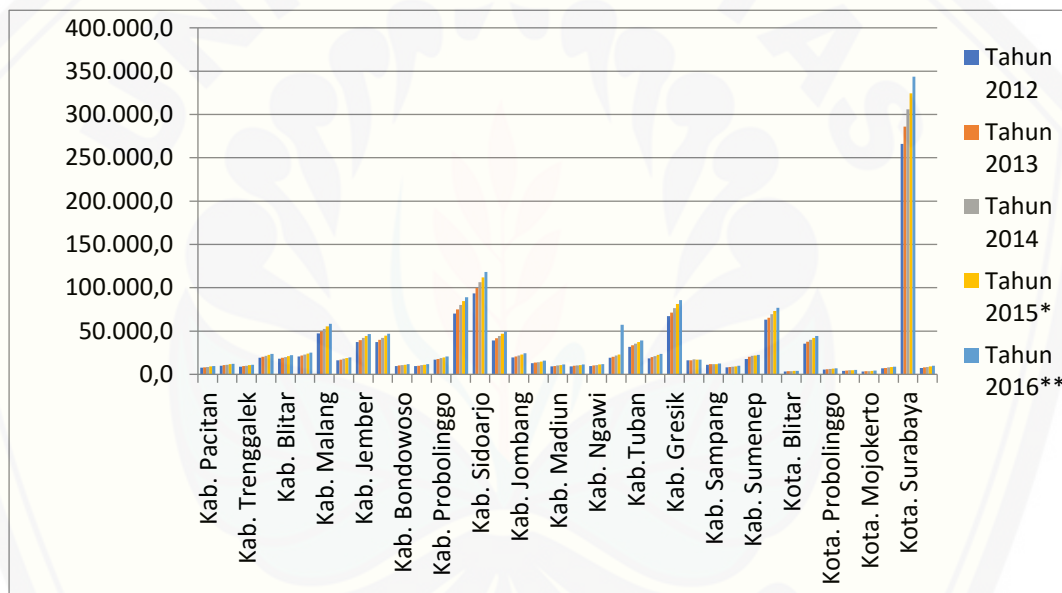
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Zakhiya (2011) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Penelitian mengenai pengaruh PAD, DAK, DAU, DBH, dan pertumbuhan ekonomi yang pernah dilakukan oleh Hendriwiyanto dan Kholis (2014), dan hasil pengujian secara langsung menunjukkan PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Salawali (2016) menyatakan bahwa perbedaan tersebut dikarenakan setiap daerah memiliki perbedaan potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya serta beban tugas dan fungsi antar tingkat pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu pola dalam menghitung hasil perkembangan kesejahteraan yang diukur dengan besarnya pertumbuhan yang dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB Atas Dasar Kostan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah.



Gambar 1.1 PDRB Atas Harga Konstan 2010 tahun 2012-2016 di 6 Provinsi Pulau Jawa (Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan PDRB tahun 2012 sampai tahun 2016 di enam provinsi di pulau Jawa. Salah satunya provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan pusat pembangunan yang memiliki tingkat tertinggi PDRB pada tahun 2016 sebesar 1.539.376,65 miliar. Sedangkan Jawa Timur menempati urutan ke dua sebesar 1.405.236,1 miliar yang ditunjukkan oleh tingkat PDRB yang lebih tinggi dari provinsi Jawa Barat (1.275.546,48), Jawa Tengah (849.383,56), DI Yogyakarta (87.687,93), dan Banten (387.595,37) pada periode 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Jawa Timur memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional sebesar 14,85%.

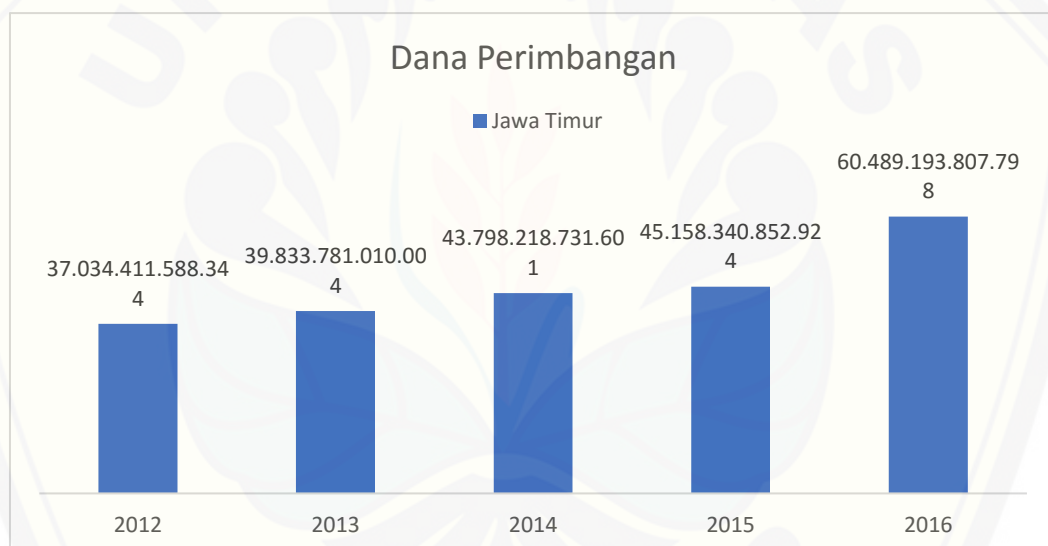


Gambar 1.2 PDRB Tahun 2012-2016 di 38 Kabupaten/kota Jawa Timur (Sumber: BPS, data diolah)

Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota yang tingkat perkembangan PDRB kabupaten/kota pada tahun 2012-2016 yang berbeda-beda. Gambar 1.2 menunjukkan kontribusi setiap kabupaten/kota di Jawa Timur terhadap PDRB di Jawa Timur Tahun 2012-2016. Di kabupaten/kota Jawa Timur yang sangat besar berkontribusi adalah Kota Surabaya. Sedangkan kabupaten/kota yang berkontribusi yang paling kecil adalah Kota Blitar. Hal ini menunjukkan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki kontribusi yang berbeda-beda pada setiap daerah. Selain itu, dalam implementasi desentralisasi penerimaan di Jawa Timur masih semu. Artinya, masih banyak aspek-aspek penerimaan yang masih menjadi wewenang pemerintah

pusat. Oleh karena itu dari sudut pandang tersebut, revenue decentralization sebenarnya masih belum terimplementasikan dengan baik di Jawa Timur.

Penerapan penerimaan daerah pada era desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan tersebut, pada dasarnya pada era desentralisasi fiskal telah terlaksana selama kurang lebih dari 16 tahun dari mulai tahun 2001 silam. Sebenarnya kenaikan pertumbuhan yang terjadi itu dapat dihitung kecil karena pada sebagian daerah yang berada di Indonesia salah satunya di Jawa Timur masih bergantung pada bantuan (grant) dari pemerintah pusat hal ini dapat dilihat pada tingginya penerimaan daerah yang diproposi dari dana perimbangan yaitu DAU, DAK, dan DBH yang diterima oleh daerah dibandingkan dengan penerimaan yang berasal daerah itu sendiri, yang seperti terlihat pada gambar 1.3:



Gambar 1.3 Dana Perimbangan Jawa Timur (Rupiah) Tahun 2012-2016 (Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur, data diolah)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa kebutuhan dana perimbangan Jawa Timur semakin meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Sehingga dengan meningkatnya dana perimbangan tersebut menunjukkan adanya ketidakmampuan di Jawa Timur dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi daerah. Sehingga mengindikasikan kemandirian fiskal menjadi sangat minimum dan tergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Sementara disisi lain, desentralisasi fiskal menimbulkan distorsi ekonomi pada beberapa daerah, karena ada salah satu cara untuk meningkatkan PAD daerah

yaitu dengan ekstensifikasi pajak. Dapat dilihat pada tahun 2012 hingga tahun 2016 PAD mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 PAD sebesar 16.855.3444.878.830 rupiah, sedangkan pada tahun 2016 PAD sebesar 31.230.667.307.542 rupiah. Tetapi dengan adanya peningkatan tersebut mempengaruhi kebijakan para investasi di daerah dan menjadi turun, disebabkan oleh adanya pajak yang tinggi dan beraneka ragam sehingga para investor malas untuk menginvestasikan modal di daerah tersebut. Selain itu, kondisi para birokrat daerah makin menjadi-jadi dengan adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah membuat tingkat korupsi dana dari pusat semakin meningkat, sebagaimana yang berdasarkan Martinez dan McNab (2003) mengatakan bahwa dengan adanya desentralisasi kemungkinan besar terjadi korupsi di daerah akan lebih besar, dikarenakan pemerintah daerah memiliki kesempatan besar atau kekuasaan yang lebih besar dan rintangan dalam melakukan korupsi.

Sehingga desentralisasi fiskal telah aktif diterapkan di Indonesia yang terbukti memberikan dampak terhadap PDRB khususnya Provinsi Jawa Timur. Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang dapat dilihat dari penerimaan daerah bertujuan agar setiap daerah mampu mengelola anggaran dana yang baik, tercapainya kemandirian fiskal dan juga peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Keputusan desentralisasi fiskal oleh pemerintah menjadi menarik untuk diteliti yaitu Bagaimana Pengaruh Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan daerah yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, serta DBH pada di era desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur periode 2012-2016, secara bersama-sama?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan daerah yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, serta DBH pada di era desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur periode 2012-2016, secara individu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh penerimaan daerah yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, serta DBH pada di era desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur periode 2012-2016, secara bersama-sama.
2. Menganalisis pengaruh penerimaan daerah yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, serta DBH pada di era desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur periode 2012-2016, secara individu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, maka hasil yang diambil dari penelitian diharapkan dapat memerikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi mengenai variabel – variabel yang mempengaruhi indikator penerimaan daerah pada desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - b. Dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan bagi lembaga pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan fiskal.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan kepada penelitian selanjutnya mengenai kajian pada bidang yang sama.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penelitian yang serupa.
- c. Memahami dan mendalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi fiskal.



BAB II TIJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan pemberian Otonomi Daerah yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan (Kuncoro, 2004).

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa Otonomi Daerah merupakan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Menurut Halim (2001), terdapat beberapa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan Otonomi Daerah diantaranya :

- a. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan

c. perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan Otonomi Daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan APBD yang semakin meningkat.

Kaloh (2002) menyatakan bahwa Otonomi Daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi Daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya. (Remy Prud’homme, 1995; Sugiyanto, 2000) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam Otonomi Daerah, antara lain menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin, mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan fiskal, mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing* dan perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah, antara lain penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Sebelum merealisasikan ketentuan Pasal 8 ayat (1), pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang menggantikan dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1956 (Saragih, 2003). Seiring adanya peyempurnaan terhadap Undang – undang otonomi atau desentralisasi, pemerintah bersama dengan DPR RI menetapkan Undang-undang Otonomi yang baru yaitu Undang Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan dari Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

serta Undang Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah melakukan pergantian Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dikarenakan UU No. 32 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, tercantum bahwa Indonesia menerapkan desentralisasi dalam empat variasi, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, instansi vertikal, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab wewenang pemerintahan umum. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus tugas pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan akan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, kebijakan otonomi daerah merupakan derivatif kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan melalui sebagian pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke daerah. Artinya,

apabila semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah (Bah1, 2000).

Kumorotomo (2008) desentralisasi fiskal adalah peyerahan sebagian dari tanggung jawab fiskal atau keuangan negara dari pemerintah pusat ke pemerintahan dibawanya (provinsi, kabupaten atau kota). Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi dimana pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, sehingga pemerintah daerah harus didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Bahl (2000) desentralisasi fiskal harus diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*). Secara teori dengan adanya kemampuan pajak, sehingga pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Dimana pajak yang dikenakan oleh pemerintah ini secara teori dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Maka dampak positif pajak (*local tax rate*) dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa *tax revenue* akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik. Sebaliknya, dampak negatif pajak bagi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan karena pajak menimbulkan "*deadweight loss of tax*". Apabila pajak dikenakan pada barang, maka pajak akan mengurangi surplus konsumen dan produsen. Selain itu, berdasarkan Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Dan juga Oates menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Dimana daerah yang memiliki kelebihan dalam pembuatan anggaran pembelanjaan yang lebih efisien sehingga dapat memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya daerah itu sendiri.

Desentralisasi fiskal memiliki empat pilar, yaitu: tanggung jawab pengeluaran, penugasan pendapatan, transfer antar pemerintah, dan pinjaman daerah. Pilar pertama, tanggung jawab pengeluaran menjelaskan fungsi-fungsi manakah yang harus ditugaskan kepada tingkatan yang berbeda dalam keseluruhan sistem pemerintahan di sebuah negara. Tanggung jawab pengeluaran sangat bergantung pada kondisi daerah dan tidak ada penugasan yang dianggap paling baik secara umum. Pilar kedua, penugasan pendapatan, menentukan sumber-sumber pendapatan mana yang ditugaskan untuk pemerintah daerah. Penugasan pendapatan bergantung pada tanggung jawab pengeluaran karena penganggaran seharusnya menyesuaikan dengan program yang telah ditetapkan. Pilar ketiga, transfer antar pemerintah, diperlukan oleh sebuah daerah jika penugasan pendapatan tidak menjamin kecukupan pendapatan. Pilar keempat, pinjaman daerah, diperlukan jika tidak terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah yang sudah memasukkan transfer antar pemerintah. Pinjaman daerah sebaiknya dilakukan untuk program pembangunan jangka panjang yang tidak rutin dikeluarkan (UNDP, 2005). Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik jika didukung faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, adanya peran Pemerintah Pusat yang intensif dalam melakukan pengawasan dan enforcement. Kedua, terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, khususnya dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Ketiga, stabilitas politik yang kondusif. Keempat, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, dimana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya harus transparan serta pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Kelima, desain kebijakan dari keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan daerah. Keenam, kualitas sumberdaya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran yang sebelumnya merupakan Pemerintah Pusat (Sidik, 2002).

2.1.3 Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Menurut Bird dan Vaillancourt, terdapat dua model hubungan antar pemerintahan yang berlaku saat ini. Pertama, federalisme fiskal dan kedua adalah keuangan federal. Federalisme fiskal merupakan studi yang mempelajari tentang hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah dimana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melakukan rancangan keuangan pada tingkat nasional maupun subnasional. Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya. Pada dasarnya konsep federalisme fiskal yang dimaksudkan adalah pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di beberapa negara yang berbentuk federal dimana pemerintahan negara bagian bukan sebagai pelaku otonom (Prasetyia, 2013). Selain itu, Dalam berbagai kajian tentang federalisme fiskal (*fiscal federalism*), terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu teori tradisonal (*first generation theories*) dan *new perspective theories* (*second generation theories*). Menurut Hayek (1945) dalam Khusaini (2006), tentang penggunaan “*knowledge in society*”, dalam pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya.

Dalam model federalisme fiskal, konsentrasi keuangan di pusat demikian tinggi. Dalam bentuk ini kerangka yang sesuai untuk desentralisasi bersifat top down dan berpola dekosentrasi (pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah tingkat II) , pemerintah pusat dapat secara sepihak menentukan dan mengubah baik tanggung jawab pengeluaran maupun pendapatan Pemerintah Daerah dan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintahan dalam upaya mengatasi permasalahan permasalahan. Implikasi dari hubungan fiskal dari model federalisme fiskal ini adalah berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Dati I ke Dati II) dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi regional dan infrastruktur lokal. Secara umum Pemerintah Daerah dalam

melakukan belanja akan sesuai dengan pedoman dan sektor-sektor yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Hubungan fiskal dengan model federalisme ini akan berpengaruh pada berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dalam penerapan desentralisasi fiskal, setiap daerah juga dituntut untuk membiayai sendiri dengan biaya pembangunan, selain pendapatan daerah tidak bisa membiayai seluruh pengeluarannya. Oleh sebab itu, transfer dana dari pusat (*intergovernmental transfer*) merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan bagi pemerintah daerah. Transfer pusat ke daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Transfer tersebut penting untuk menggalakkan otonomi regional dan untuk memperbaiki infrastruktur lokal. Pada umumnya transfer akan dibelanjakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah pusat (Prasetyia , 2013).

Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia salah satunya di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga masyarakat sejahtera. Teori Federalisme Fiskal (Teori fiscal federalism) adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya (Sari dan Supadmi, 2016).

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang diambil yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali secara terus menerus dalam meningkatkan finansial daerah itu sendiri. Salah satunya ialah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), baik

meningkatkan penerimaan PAD yang sudah ada maupun PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengawasi kondisi dan potensi masyarakat.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diataur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan tarif yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Maka, Hasil pajak daerah tersebut merupakan tarif daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Menurut UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian wewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam melakukan tari pajak harus sesuai dengan fungsinya.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. Hasil retribusi daerah yaitu tarif yang secara sah menjadi tarif daerah sebagai pembayaran penggunaan usaha milik pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya yang disediakan dan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah memiliki sifat-sifat antara lain pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung meski harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan tarif yang sifatnya yang tidak menonjol dari anggaran yang telah ditentukan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perusahaan daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan berdasarkan Undang-undang.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor kekas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Yang Sah

Pengertian pendapatan asli daerah lain-lain yang sah ialah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah ialah usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar (Sidik, 2004). DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum ini bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana dasar hukum pengalokasian dana ini sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2003 tentang perimbangan dana antara pusat dan daerah besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ini sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Sedangkan proporsi DAU untuk daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan antara propinsi dan Kabupaten/kota formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (fiskal gap) yaitu selisih antara kebutuhan. Penyaluran DAU, DAK dan DBH disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah. Hal ini berkaitan dengan perimbangan antara pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan antara pusat dan daerah. Hal tersebut menunjukkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana dana tersebut secara leluasa dapat dipergunakan untuk pelaksanaan desentralisasi, (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu Halim (2002).

Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ardhani 2011).

2.1.7 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

4. Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi.

Pada umumnya setiap daerah memiliki sektor unggulan sendiri-sendiri dalam hal keuangan dan hal ini sangat bergantung pada pemerintah daerah itu sendiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Demikian halnya dalam sistem DBH yang bersumber dari pajak dan SDA. Mekanisme bagi hasil SDA dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) pusat daerah. Namun, pola bagi hasil tersebut dapat berpotensi mempertajam ketimpangan horisontal (*horizontal imbalance*) yang dialami antara daerah penghasil dan non penghasil. horisontal tersebut disebabkan karena dalam kenyataannya karakteristik daerah.

2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjelaskan atau mengukur prestasi perkembangan perekonomian disuatu wilayah. Sehingga, dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi artinya pertambahan jumlah dan produksi barang industri, pertambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya merupakan perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara.

Sedangkan, menurut Todaro (2013), mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dan kemampuan suatu negara atau daerah untuk menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan semakin banyaknya penduduk. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus-menerus; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi

secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Secara tradisional, pembangunan ekonomi ini ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Bruto/PDB atau Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Saragih 2003, Kuncoro 2004). Namun demikian, dalam realita penggunaan indikator ini saja kurang mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Sebagai alternatif digunakan pendapatan per kapita (*Income Per Capita*). Indikator ini menekankan kemampuan suatu negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku diberbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah: kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat.

Menurut Todaro dalam Hidayat, (2016) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, persalatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.

- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital dan mengakibatkan meningkatkan jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi, yang akan meningkatkan aplikasi pengetahuan ilmiah baru dalam bentuk temuan dan inovasi yang berkaitan dengan modal fisik dan modal sumber daya manusia (SDA).

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthu, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka pengusaha akan mendapat keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti ini tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat kemakmuran yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (Stasionary State). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan

perkapita. Maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum.

Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General Theory Of Employment, Interest and Money* mengembangkan suatu model makroekonomi dengan persamaan $Y = C + I + G + X - M$ (Mankiw, 2006). Dimana apabila terjadi kenaikan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor akan menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap PDB. PDB yang meningkat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Begitu sebaliknya, terjadinya penurunan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta net ekspor akan menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan terhadap PDB. PDB yang menurun akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Keynes dalam Jhingan (2003) menekankan pentingnya permintaan agregat atau permintaan efektif sebagai faktor utama penggerak perekonomian, dimana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Keynes memandang pemerintah sebagai agen independen yang menstimulasi perekonomian melalui kerja publik. Kebijakan pemerintah yang ekspansioner dapat menaikkan permintaan efektif jika sumber daya dipakai tanpa merugikan konsumsi atau investasi. Pada masa depresi ekonomi kenaikan pengeluaran pemerintah (G) akan mendorong kenaikan konsumsi (C) dan investasi (I) dan karenanya akan mendorong kenaikan GDP (Y).

Harrod-Domar dalam Arsyad (2010) mengembangkan teori keynes dengan memberi peranan kunci kepada investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi

menciptakan pendapatan (merupakan dampak dari permintaan investasi) dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital (merupakan dampak dari penawaran investasi).

2.1.9. Hubungan Penerimaan Daerah (PAD, DBH, DAU, DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan penerimaan daerah (PAD, DBH, DAU, DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dimana dengan adanya kenaikan PAD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi yang lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Dengan adanya kenaikan PAD juga akan mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa dan sektor lainnya. Apabila PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kemungkinan besar DBH, DAU, DAK juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena nilai DBH, DAU, DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD (Kuncoro, 2004).

2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penerimaan daerah pada era desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan acuan penulisan dalam penelitian antara lain :

1. Sabilla dan Jaya (2014) yang melakukan penelitian di Indonesia dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia”. Variabel independen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah (PAD), DAUK, DBH, tenaga kerja, ekspor, dan impor, sedangkan variabel dependen tingkat pertumbuhan GDP. Alat analisis yang digunakan yaitu *Panel Ordinary Least Square*. Hasil penelitian diperoleh bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional seluruh provinsi di Indonesia.
2. Joko Waluyo (2007) yang melakukan penelitian pada antar daerah di Indonesia dengan judul “ Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Indonesia”. Variabel independen yang digunakan adalah DAU, DBH, (DBHP dan DBHDA) dan desentralisasi fiskal, sedangkan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Alat analisis yang digunakan yaitu *Two Stage Least Square (TSLS)*. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dana alokasi umum (DAU) berfungsi sebagai pemerataan fiskal daerah juga merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan DAU sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah. Dana bagi hasil (DBH) menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negative dan memperburuk kesenjangan pendapatan antar daerah.
3. Khakim Lukma, *et.al.* (2011) yang melakukan penelitian kabupaten/kota di Indonesia dengan judul “Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat”. Variabel independen yang digunakan adalah PAD, DAU, dan DBH, sedangkan variabel dependen adalah

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Alat analisis yang digunakan adalah analisis *Path*. Hasil penelitian diperoleh bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD yang sah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Zhang dan Zhou (1998) yang melakukan penelitian di China dengan judul “*Fiscal Decentralization, Publik Spending and Economic Growth In China*”. Variabel independen yang digunakan adalah inflasi, tenaga kerja, keterbukaan dan investasi, sedangkan variabel dependen adalah tingkat pertumbuhan GDP riil. Alat analisis yang digunakan yaitu *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Hasil penelitian diperoleh bahwa desentralisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Hadi Sasana (2009) yang melakukan penelitian pada antar kabupaten/kota Jawa Tengah dengan judul “Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dikabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. Variabel independen yang digunakan adalah desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terserap, dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terserap, penduduk miskin dan kesejahteraan masyarakat. Alat analisis yang digunakan yaitu *Path Analisis*. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dan kesejahteraan masyarakat, selain itu tenaga kerja berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

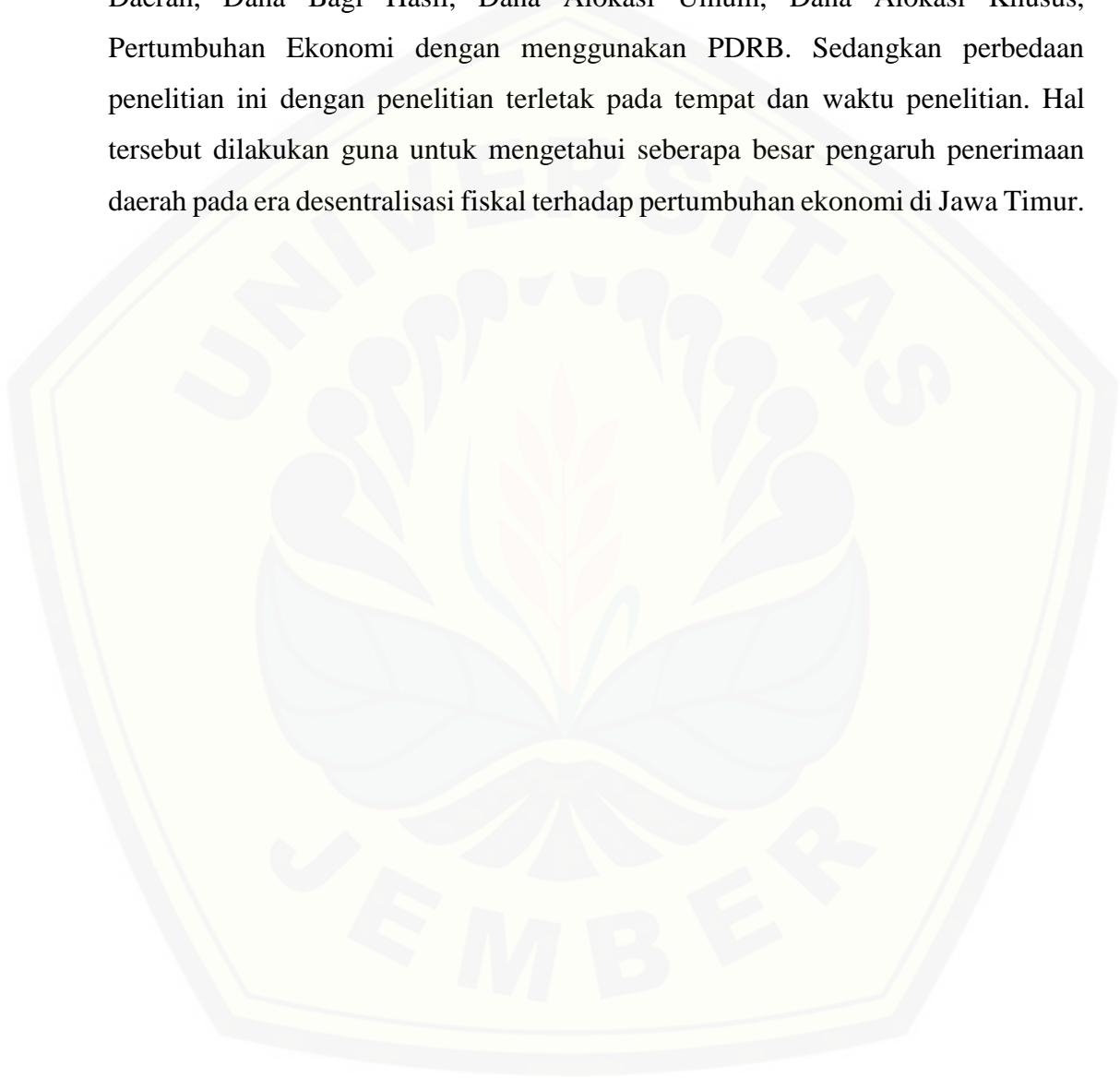
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Sabilla dan Jaya (2014)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia	PAD, DAUK, DBH, tenaga kerja, ekspor, dan impor, pertumbuhan GDP	Panel Ordinary Least Square	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional seluruh provinsi di Indonesia
2.	Joko Waluyo (2007)	Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Indonesia	DAU, DBH, (DBHP dan DBHDA) dan desentralisasi fiskal, sedangkan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan	Two Stage Least Square (TSLS)	(DAU) berfungsi sebagai pemerataan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan DAU sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah. DBH menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negative dan memperburuk kesenjangan pendapatan antar daerah
3.	Khakim, Lukma. <i>et.al.</i> (2011)	Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat	PAD, DAU, dan DBH, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	analisis <i>Path</i>	bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, DBH

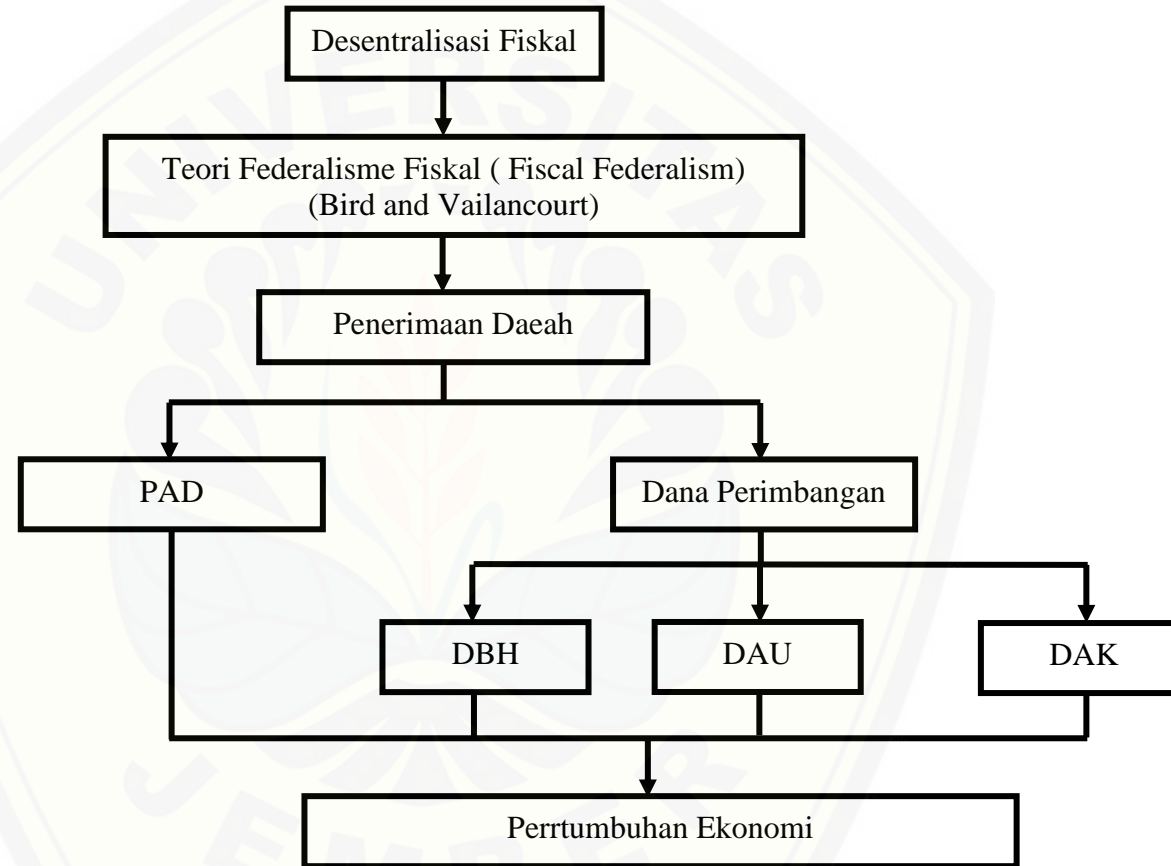
					berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD yang sah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
4.	Zhang dan Zhou (1998)	<i>Fiscal Decentralization, Publik Spending and Economic Growth In China</i>	inflasi, tenaga kerja, keterbukaan dan investasi, tingkat pertumbuhan GDP riil	<i>Least Square Dummy Variables (LSDV)</i>	Desentralisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
5.	Hadi Sasana (2009)	Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terserap, dan jumlah penduduk miskin., penduduk miskin dan kesejahteraan masyarakat	Path Analisis	Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dan kesejahteraan masyarakat, selain itu tenaga kerja berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Penelitaian Terdahulu.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode analisis *Panel Ordinary Least Square* dengan Model *Fixed Effect*. Menggunakan beberapa variabel yang sama diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan PDRB. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terletak pada tempat dan waktu penelitian. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan daerah pada era desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.



2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

- PAD : Pedapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- DBH : Dana Bagi Hasil

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dapat menarik hipotesis sebagai anggapan sementara bahwa:

1. Diduga Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur.
2. Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Terhadap:
 - a) Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Era Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur.
 - b) Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) Pada Era Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur.
 - c) Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) Pada Era Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur.
 - d) Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Era Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi variabel lainnya (*explanatory research*). Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistika. Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen melalui pengujian hipotesis.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengaruh penerimaan daerah pada era desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2012 hingga 2016. Penentuan tempat yang dipilih karena Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di pulau jawa yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi setelah DKI yakni berkontribusi 14.85% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Selain itu, di 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki perbedaan potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya serta beban tugas dan fungsi antar tingkat pemerintahan per kabupate/kota. Sehingga, di kabupaten/kota di Jawa Timur terjadi perbedaan antara kota dengan kota yang lain. Sementara itu, penentuan waktu dipilih pada tahun 2012-2016 berdasarkan setelah adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan pada wilayah Jawa Timur sehingga dapat dilihat seberapa pengaruh sesudah adanya penerapan desentralisasi fiskal yang ada di wilayah Jawa Timur.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peneliti atau sumber data yang sudah ada. Data sekunder yang ada di penelitian ini adalah data panel pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data diperoleh

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data PDRB, data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Dana Bagi Hasil.

3.4 Spesifikasi Model Penelitian

Spesifikasi model penerimaan daerah pada era desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada model yang digunakan oleh Sabilla dan Jaya (2014) dalam penelitiannya. Model penelitian ini merupakan fungsi dari penerimaan daerah pada pertumbuhan, maka persamaan fungsinya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + u_{it} \dots\dots\dots(3.1)$$

Dari persamaan fungsi (3.1) tersebut selanjutnya di transformasikan ke dalam model ekometrika linear sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + u_{it} \dots\dots\dots(3.2)$$

Dari persamaan ekometrika linear (3.2) tersebut selanjutnya di transformasikan ke dalam model ekometrika semilog (lin-log) sebagai berikut :

$$\log Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log X1_{it} + \beta_2 \log X2_{it} + \beta_3 \log X3_{it} + \beta_4 \log X4_{it} + u_{it} \dots\dots\dots(3.3)$$

dimana :

Y = Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (Rupiah)

X1 = Penpatan Asli Daerah (Rupiah)

X2 = Dana Alokasi Umum (Rupiah)

X3 = Dana Alokasi Khusus (Rupiah)

X4 = Dana Bagi Hasil (Rupiah)

u_{it} = Faktor gangguan stokastik

3.5 Alat Analisis Penelitian

Alat analisis data merupakan alat yang digunakan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendukung hasil penelitian dari permasalahan yang dihadapi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

1. Metode Regresi Data Panel

Untuk dapat mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas (*independent variabel*) terhadap variabel terkait (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil. Digunakan metode ini agar dapat mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), Dana Alokasi Khusus (X_4), terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* yang mampu menyediakan data lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar (Gujarati, 2012). Terdapat dua jenis data panel dalam analisis ekonometrik yaitu *balanced panel* dan *unbalanced panel*. Jika sebuah subjek memiliki waktu yang sama dalam observasi disebut *balanced panel* dan jika waktu observasi tidak sama dalam subjek maka disebut dengan *unbalanced panel* (Gujarati, 2012). Menurut Baltagi dalam Gujarati terdapat beberapa keuntungan menggunakan data panel, yaitu:

- a. Data panel merupakan kombinasi antara data time-series dan data *crosssection* maka data panel akan memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif, mengurangi korelasi antar variabel, derajat kebebasan lebih banyak dan lebih efisien.
- b. Dengan mempelajari bentuk cross-section berulang-ulang dari observasi, data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika perubahan.
- c. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dalam mengukur efek efek yang tidak dapat diobservasi dalam *cross-sectional* maupun data *time-series* murni.

- d. Data panel memungkinkan untuk dipelajarinya model perilaku yang lebih rumit.

A. Prosedur Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model regresi dengan data panel, digunakan beberapa teknik yaitu: *Model Common Effect*, *Model Fixed Effect* dan *Model Random Effect*.

a. Chow Test

Chow Test merupakan uji untuk memilih apakah pendekatan model yang digunakan *common effect* atau *fixed effect* yang digunakan untuk menguji stabilitas dari parameter. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H0 : Model *Common Effect* (*restricted*)

H1 : Model *Fixed Effect* (*unrestricted*)

Chow Test menggunakan distribusi F dengan rumus sebagai berikut :

$$F_{N-1, NT-N-K} = \frac{\frac{(RRSS-URSS)}{(N-1)}}{URSS/(NT-N-K)}$$

Keterangan :

RRSS = *Restricted Residual Sum Square*

URSS = *Unrestricted Residual Sume Square*

N = Jumlah data *cross section*

T = Jumlah data time series

K = jumlah variabel penjelas

Statistik F menggunakan distribusi F dengan N-1 dan N-K derajat kebebasan. Jika F dengan N-1 dan N-K derajat kebebasan. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau F signifikan maka pendekatan yang dipakai adalah *unrestricted* atau pendekatan *fixed effect*

b. Hausmant test

Untuk memilih pendekatan mana yang sesuai model persamaan dan data antara *fixed effect* dan *random effect* dapat digunakan spesifikasi Hausmant. *Hausman Test* ini menggunakan nilai *Chi Square* sehingga keputusan pemilihan

metode data panel ini dapat ditentukan secara statistik. Hipotesis dari uji Hausman sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Statistik Hausman menggunakan nilai *Chi Square Statistics*, jika hasil uji hausmant menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik. Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect* sedangkan sebaliknya gagal menolak hipotesis yaitu ketika nilai statistik Hausmant lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *random effect*

B. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakandalam mengelolah data panel, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu:

a. Model *Common Effect*

Motode Common Effect merupakan metode yang hanya menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu (Nachrowi, 2006). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar kabupaten/kota baik dari segi kewilayahaannya sangat berbeda.

b. Model *fixed effect*

Model fixed effect merupakan metode yang mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel, *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model estimasi ini sering juga disebut dengan metode Least Squares Dummy Variable (LSDV). Ada beberapa asumsi untuk dalam metode ini antara lain : (1) intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu, (2) slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu, (3) slope tetap tetapi berbeda

baik antar waktu maupun antar individu, (4) intersep dan slope berbeda antar individu, dan (5) intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. Kesulitan dalam penggunaan data panel adalah asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut dengan memasukkan variabel *dummy*, untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik dalam *cross-section* maupun *time series*.

c. Metode *Random Effect*

Metode *Random Effect* merupakan metode yang mengestimasi data panel dimana variabel gangguan saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Nachrowi, 2006). Teknik yang digunakan dalam metode *random effect* adalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar individu. Teknik metode OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan Metode *Generalized Least Square* (GLS).

2. Uji Statistik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pada masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas baik secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel terikat, antara lain :

A. Uji F-statistik

Uji F dikenal dengan Uji serentak yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji ini menggunakan $\alpha = 5\%$, maka pengujian hipotesis yang digunakan yaitu:

1. Apabila F probabilitas $\leq \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Apabila F probabilitas $\geq \alpha$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Selain menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan perbandingan probabilitas nilai Uji F dengan tingkat signifikansi, pengujian

hipotesis Uji F dapat menggunakan perbandingan nilai F hitung dengan nilai F-tabel (Ajija,*et.al*, 2011). Nilai F-hitung dapat menggunakan rumus:

$$F_{hit} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan :

- R^2 = koefisien determinasi
 k = jumlah variabel independen
 n = jumlah observasi

B. Uji t-statistik

Uji t merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji koefisiensi regresi dan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menentukan t_{tabel} digunakan taraf signifikan sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan kebebasan, $df = (n - k - 1)$ yang mana k merupakan jumlah variabel independen. Perhitungan H_0 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\text{Koefisien regresi } \beta_i}{\text{Standardt deviasi } \beta_i}$$

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

C. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji Koefisiensi Determinasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel terikat Y yang dapat menerangkan variabel bebas X. Koefisiensi determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}^1 - \hat{Y})^2}{\sum(\hat{Y}^1 - \hat{Y})^2}$$

Nilai R^2 atau (R^2 adjusted) berkisar antara 0 sampai dengan 1 (Ajija, *et.al*, 2011). Nilai R^2 yang sempurna adalah 1, yaitu jika keseluruhan variabel bebas dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel terikat yang dimaksudkan ke dalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$ dapat disimpulkan adalah:

- b. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol (0), berarti kemampuan variabel terikat dalam menjelaskan variabel bebas yang sangat lemah.
- c. Nilai R^2 yang mendekati satu (1), berarti kemampuan variabel terikat dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variabel bebas yang sangat tinggi.

3. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan suatu keadaan yang dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel dependen lainnya, dengan kata lain dengan adanya gejala multikolinearitas yang menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan yang sempurna antara semua atau beberapa variabel dependen (Wardhono, 2004). Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi (Ekananda. M, 2015). Multikolinearitas menunjukkan terdapat hubungan sempurna antar semua atau beberapa variabel dependen. Multikolinearitas dapat terjadi dengan ciri - ciri adanya nilai R^2 yang nilainya tinggi, dan nilai t semua variabel dependen tidak signifikan, serta nilai F tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah multikolinearitas. Akibatnya adalah koefisien regresi menjadi tidak terduga (Wardhono, 2004).

Kondisi terjadinya multikolinearitas ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2012):

- a. Nilai R^2 sangat tinggi tetapi berdasarkan uji t konvensional secara statistik signifikan tidak ada koefisien regresi.
- b. Jika model yang digunakan melibatkan dua variabel penjelas, untuk mendeteksi kolineritas yaitu memeriksa koefisien korelasi zero order atau

sederhana diantara kedua variabel. Jika koefisiensi ini tinggi, maka multikolinieritas umum akan terjadi.

- c. Jika koefisien korelasi zero order dapat menyestatkan pada model yang melibatkan lebih dari dua varaibel X, maka kemungkinan koefisien korelasi zero order yang redah, namun multikolinieritasnya tinggi.
- d. Jika nilai R^2 tinggi tetapi korelasi individu yang rendah, kemungkinan terdapat multikolinieritas. Apabila, satu atau lebih variabel mungkin tidak berguna. Namun demikian, jika nilai R^2 tinggi dan koefisien korelasi individu juga tinggi, maka multikolinieritas kemungkinan belum dapat dideteksi.
- e. Oleh sebab itu, seseorang yang melakukan regresi untuk setiap variabel X_i terhadap variabel X dan sisanya pada model dan mencari tahu koefisiendeterminasinya (R_i^2). Apabila nilai R_i^2 yang tinggi menunjukkan bahawa X_i berkorelasi kuat dengan semua variabel X lainnya.

Besaran korelasi parsial anantara variabel independen yang dapat dikatakan memiliki multikolinieritas yaitu jika koefisien korelasi antara maing-masing variabel bebas memiliki koefisien korelasi lebih dari 0,85, maka kolineritas berganda merupakan masalah yang serius (Ekananda, 2015). Dalam model multikolinieritas tidak harus menjadi masalah yang serius karena meskipun mempunyai masalah didalam model multikolinieritas, model akan tetap dapat terus digunakan tetapi hanya saja standar error yang akan bermasalah. Sehingga model dengan kondisi ini masih tetap bersifat BLUE (Widarjono, 2013)

B. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model di dalam penelitian terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu kepengamatan yang lainnya. Jika varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap atau tidak mempunyai varian yang sama maka dapat terlihat bahwa dalam model terjadi masalah heteroskedastisitas (Gujarati, 2012). Menurut Wardhono (2004) untuk dapat mendeteksi adanya heteroskedastsitas atau tidak maka dapat dengan pengujian hipotesis, dapat terlihat pada nilai F-statistik

dan nR^2 - statistik, dimana n adalah jumlah observasi yang relevan dengan nilai probabilitas. Hal itu dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas $obs \cdot R$ -squared dengan nilai α . Jika nilai probabilitas $obs \cdot R$ -squared $> \alpha$ ($\alpha = 5\%$) maka model dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti model merupakan homokedastisitas dan uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji *White Heteroschedasticity*.

C. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hal tersebut seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk dapat mendeteksi apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006). Prosedur pengujian statistik didasarkan pada asumsi bahwa faktor kesalahan μ_i didistribusikan secara normal, karena kesalahan μ_i yang sebenarnya tidak dapat diamati secara langsung, maka direkomendasikan untuk menggunakan residu e_i yang merupakan taksiran μ_i untuk mengetahui normalitas dari μ_i . Keadaan harus terlihat jelas dan dapat terpenuhi dalam hubungan dengan keabsahan yang dilakukan oleh uji t dan uji F . Kriteria pengujian kenormalan adalah dengan menghitung nilai Chi-square dengan keterangan dimana jika Ch -hitung $> Ch$ tabel, dikatakan bahwa residual dari model tidak normal dan sebaliknya dan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera* (JB). Apabila $JB > X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi tidak normal dan sebaliknya, apabila $JB < X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi normal. Sehingga dapat dilakukan juga dengan menggunakan nilai probabilitas JB apabila signifikan 5% maka residual berdistribusi normal.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah penjelasan secara detail mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi variabel yang digunakan antara lain:

1. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dalam penelitian ini dipresentasikan dengan 4 variabel yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).

a) PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Data yang digunakan untuk melihat PAD adalah PAD yang berdasarkan Kabupaten/kota pada tahun 2012-2016 (BPKAD PROP JATIM) dalam satuan rupiah.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data yang digunakan untuk melihat DAU adalah DAU yang berdasarkan Kabupaten/kota pada tahun 2012-2016 (BPKAD PROP JATIM) dalam satuan rupiah.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data yang digunakan untuk melihat DAK adalah DAK yang berdasarkan

Kabupaten/kota pada tahun 2012-2016 (BPKAD PROP JATIM) dalam satuan rupiah.

d) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data yang digunakan untuk melihat DBH adalah DBH yang berdasarkan Kabupaten/kota pada tahun 2012-2016 (BPKAD PROP JATIM) dalam satuan rupiah.

2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2017). Data yang digunakan untuk melihat tingkat PDRB adalah PDRB Provisi Jawa Timur Kabupaten/kota Atas Dasar Harga Kostan 2010 pada tahun 2012 hingga 2016 dalam satuan rupiah. Pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB dikarenakan tingkat PDRB suatu daerah dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Sehingga PDRB merupakan suatu pola untuk menghasilkan hasil perkembangan kesejahterann disuatu daerah yang mengalami kemajuan perekonomian.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Secara bersama-sama Penerimaan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus pada era desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Jawa Timur Tahun 2012-2016.
2. Secara individu Penerimaan Daerah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pada Era Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016.
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016.
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016.
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016.

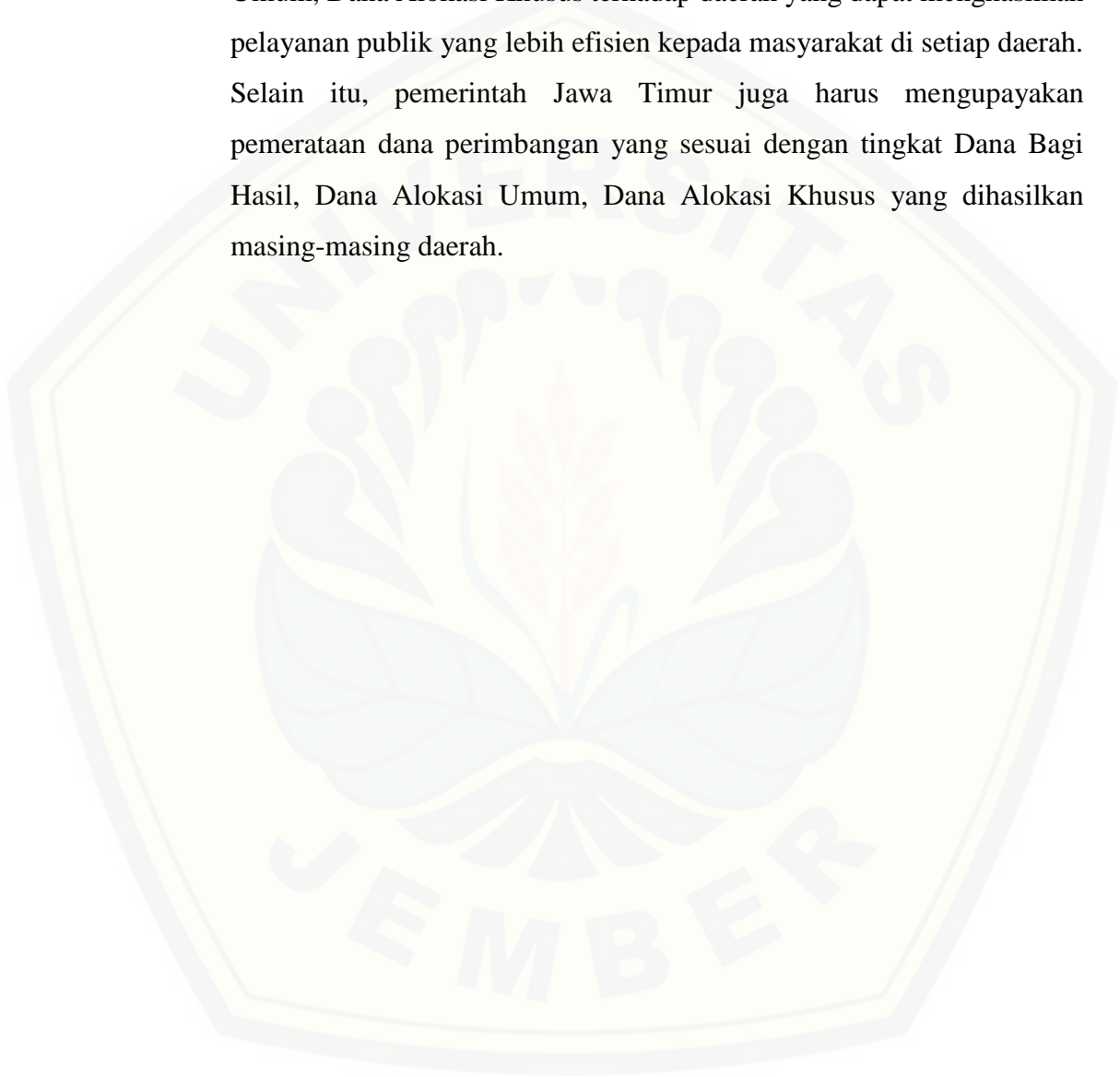
5.2 Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat diajukan dan dapat diberikan yang berkaitan dengan penelitian penerimaan daerah pada era desentralisasi fiskal di Jawa Timur yaitu:

1. Pemerintah Jawa Timur harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan harus menggantungkan diri pada transfer dari pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan perbaikan kebijakan peraturan (perda) pajak dan retribusi dengan cara tanpa melihat kemampuan daerah, sehingga agar masyarakat tidak terbebani dan

pelaku usaha tidak segan untuk melakukan investasi atau ekspansi di daerah tersebut.

2. Pemerintah dalam kebijakan desentralisasi fiskal harus lebih banyak memberikan dana perimbangan antara Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap daerah yang dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih efisien kepada masyarakat di setiap daerah. Selain itu, pemerintah Jawa Timur juga harus mengupayakan pemerataan dana perimbangan yang sesuai dengan tingkat Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang dihasilkan masing-masing daerah.



Daftar Pustaka

- Ajija, Shochrul. R. et al. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. 2012-2016. *DBH Provinsi Jawa Timur*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. 2012-2016. *DAK Provinsi Jawa Timur*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. 2012-2016. *DAU Provinsi Jawa Timur*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. 2012-2016. *PAD Provinsi Jawa Timur*.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Bahl, Roy W. 2000. *China Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom : Cambridge University Press.

- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Ekananda, M. 2015. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Edisi Pertama.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, N. D. dan Porter, C. D. 2012. *Dasar – Dasar Ekometrika*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 5.
- Gunantara, dan Dwirandara. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderai Di Bali*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. vol. 7 no 3. Bali.
- Hadi, S. 2006. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Pembangunan. Vol. 3, No.2, Desember 2006: 145-170.
- Hadi, S. 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 – 124.
- Halim, A. 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hidayat, M. N. S. 2016. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Timur (Studi Kasus 38 Kab/Kota Di Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya Malang.

- Hendriwiyanto, Guntur dan Nur Kholis. 2014. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol .3 No. 1. Universitas Brawijaya.
- Hendriwiyanto, G. (2013). *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Medias*. Universitas Brawijaya Malang.
- Husna, A., & Sofia, M. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*. JEMI, Vol. 4, No. 2, Desember 2013.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terjemahan D. Guritno. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Joko, W. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Yogyakarta.
- Kaloh, J, 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Khakim, L., dkk 2011. *Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12, No. 2, Desember 2011: 281-296.
- Kharisma, B. 2013. *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan. Vol. 14, No. 2, Oktober 2013: 101-119.
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Madang : BPFE UNIBRAW.

- Khusaini, M. 2017. *Desentralisasi Fiskal Dan Manajemen Anggaran Daerah : Studi Di Jawa Timur*. Journal of Indonesian Applied Economics. Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 18-35.
- Kumorotomo, W. 2008. *Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Predana Media Group. Edisi Pertama.
- Kuncoro M, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, D. 2012. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Gemas Eksos. Vol 7, No 2. 2012.
- Kusuma, H. 2016. *Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol. 9 No. 1 Februari 2001.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makro Ekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Martinez, V.J, & McNab, R (2003). *Fiscal Decentralization And Economic Growth*. World development, Vol. 31 No. 9, 1597-1616.
- Nachrowi, N.D. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Oates, W E. 1999. *An Essay on fiscal federalism*. Journal of Economic Literature, 37(3): 1120-1149.
- Oates, W. E. 1993. Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 26 (2): 237-243.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permanasari, W. A. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal*

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Prasetyia. 2013. <http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-VIII-Federalisme.pdf>.

Prud'homme, Remy, 1995. *On the Danger of Decentralization*. Washington D.C., The World Bank, Policy. Research Working Paper, 1252.

Putri, Z. E. 2015. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Bisnis & Manajemen. Vol. 5, No. 2, Oktober 2015.

Sabilla, K. dan Jaya, W. K. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 15, No. 1, April 2014: 12-22.

Salawali, dkk. 2016. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah*. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol.18 No. 2.

Saragih, P. J. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sari, dan Supadmi. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia*. E-Jurnal Akuntansi Universits Udayana. Vol.15.3. Juni (2016): 2409-2438.

Sidik, Mahfud. 2004. *Prinsip dan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Berbagai Negara dalam Bunga Sampai Desentralisasi Fiskal Jakarta*. Dirjen PKPD.

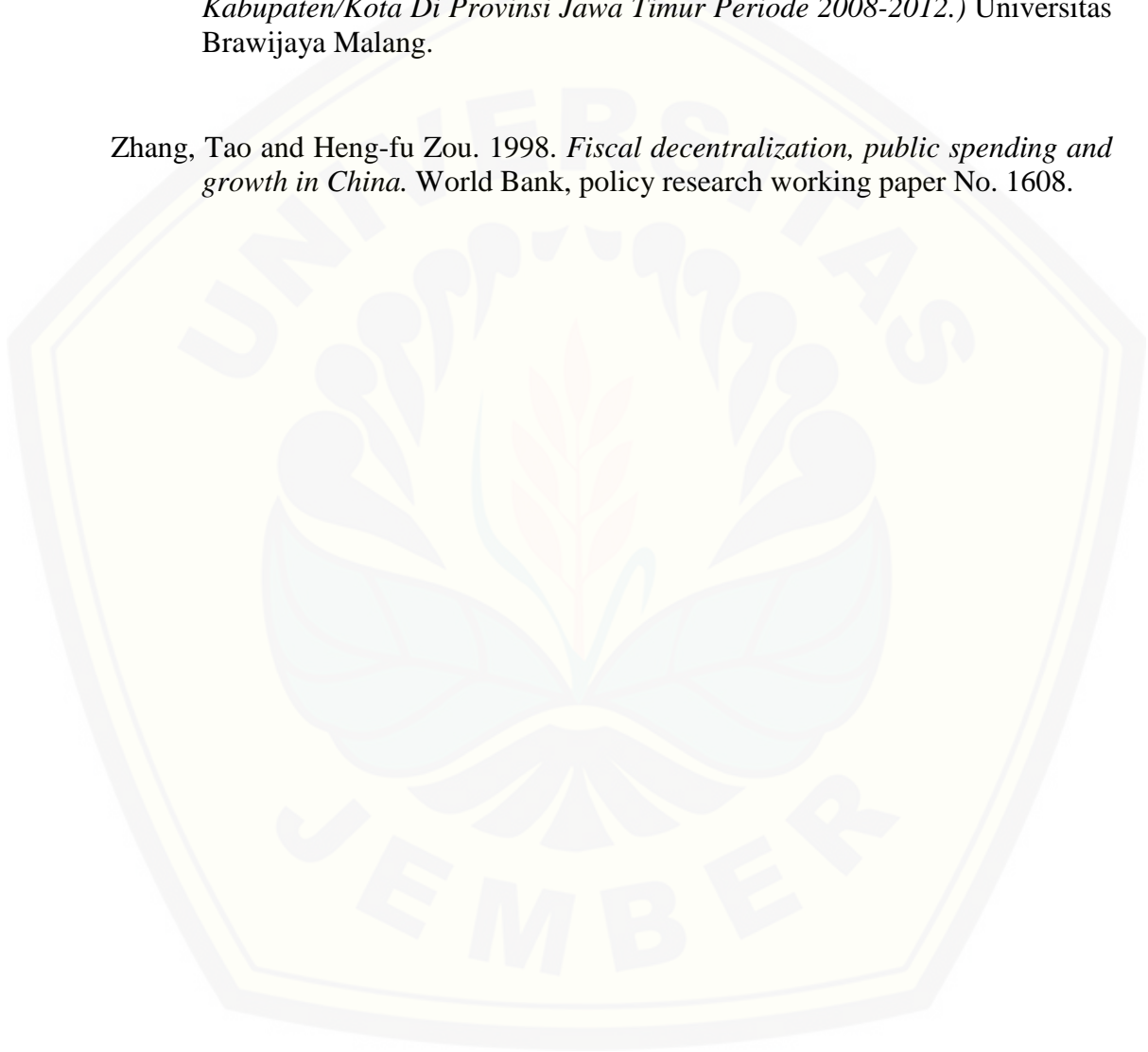
Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal*. Yogyakarta.

- Sugiyanto, 2000. *Kemandirian dan Otonomi Daerah*. Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XII, No.1 Hal.: 1-7, Semarang : FE UNDIP.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Sulistiawati, R. 2012. *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan. Vol. 3, No.1. 2012: 29-30.
- Tahar, Afrizal dan Maulida Zakhiya. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol. 12 No. 1, Januari 2011, hal.88-89.
- Taqwa. D. F. 2016. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Perumbuhan Dan Kesenjangan Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014*. Jember. Skripsi. Universitas Jember.
- TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
- Todaro, M. P. 2013. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. edisi kesebelas.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- United Nations Development Program. 2005. *Fiscal Decentralisation and Poverty Reduction. UNDP Primer*.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika : Teori dan Aplikasi*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Yuana, A. P. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012.)* Universitas Brawijaya Malang.

Zhang, Tao and Heng-fu Zou. 1998. *Fiscal decentralization, public spending and growth in China*. World Bank, policy research working paper No. 1608.



LAMPIRAN A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Pacitan	7.705.000.000.000	8.157.600.000.000	8.582.200.000.000	9.019.500.000.000	9.489.100.000.000
Kab. Ponorogo	10.038.400.000.000	10.554.500.000.000	11.104.500.000.000	11.687.900.000.000	12.305.700.000.000
Kab. Trenggalek	8.959.500.000.000	9.496.700.000.000	9.998.400.000.000	10.500.800.000.000	11.026.500.000.000
Kab. Tulungagung	18.999.000.000.000	20.164.300.000.000	21.265.200.000.000	22.326.600.000.000	23.446.400.000.000
Kab. Blitar	18.054.500.000.000	18.967.300.000.000	19.920.200.000.000	20.925.500.000.000	21.991.400.000.000
Kab. Kediri	20.535.300.000.000	21.730.500.000.000	22.886.300.000.000	24.002.300.000.000	25.211.900.000.000
Kab. Malang	47.075.700.000.000	49.571.400.000.000	52.549.300.000.000	55.316.000.000.000	58.247.300.000.000
Kab. Lumajang	16.053.400.000.000	16.949.600.000.000	17.852.100.000.000	18.677.700.000.000	19.555.200.000.000
Kab. Jember	37.262.000.000.000	39.519.200.000.000	41.968.800.000.000	44.204.100.000.000	46.526.600.000.000
Kab. Banyuwangi	37.235.700.000.000	39.733.600.000.000	41.997.600.000.000	44.523.500.000.000	46.924.600.000.000
Kab. Bondowoso	9.583.400.000.000	10.140.100.000.000	10.651.900.000.000	11.178.700.000.000	11.735.600.000.000
Kab. Situbondo	9.411.600.000.000	9.993.800.000.000	10.572.400.000.000	11.086.500.000.000	11.640.800.000.000
Kab. Probolinggo	16.936.800.000.000	17.808.900.000.000	18.681.300.000.000	19.570.400.000.000	20.504.100.000.000
Kab. Pasuruan	70.155.200.000.000	75.031.900.000.000	80.093.200.000.000	84.399.800.000.000	89.011.200.000.000
Kab. Sidoarjo	93.403.700.000.000	99.872.300.000.000	106.294.400.000.000	111.884.200.000.000	118.179.200.000.000
Kab. Mojokerto	39.046.000.000.000	41.607.100.000.000	44.290.700.000.000	46.792.400.000.000	49.321.900.000.000
Kab. Jombang	19.514.800.000.000	20.672.300.000.000	21.793.200.000.000	22.960.200.000.000	24.199.100.000.000
Kab. Nganjuk	12.767.000.000.000	13.456.000.000.000	14.142.600.000.000	14.875.700.000.000	15.661.800.000.000
Kab. Madiun	9.132.900.000.000	9.651.200.000.000	10.166.700.000.000	10.702.000.000.000	11.268.900.000.000

Kab. Magetan	9.251.200.000.000	9.792.600.000.000	10.292.400.000.000	10.824.100.000.000	11.398.100.000.000
Kab. Ngawi	9.567.500.000.000	10.093.200.000.000	10.680.200.000.000	11.223.200.000.000	11.807.600.000.000
Kab. Bojonegoro	18.971.000.000.000	20.390.100.000.000	21.625.400.000.000	22.858.600.000.000	57.187.400.000.000
Kab. Tuban	31.816.300.000.000	33.678.800.000.000	35.519.400.000.000	37.254.700.000.000	39.081.800.000.000
Kab. Lamongan	18.562.700.000.000	19.848.800.000.000	21.100.100.000.000	22.316.800.000.000	23.623.800.000.000
Kab. Gresik	67.248.800.000.000	71.314.200.000.000	76.336.700.000.000	81.359.400.000.000	85.835.100.000.000
Kab. Bangkalan	16.173.700.000.000	16.204.000.000.000	17.369.800.000.000	16.907.100.000.000	17.018.600.000.000
Kab. Sampang	10.910.900.000.000	11.623.800.000.000	11.632.900.000.000	11.874.500.000.000	12.606.800.000.000
Kab. Pamekasan	7.894.000.000.000	8.375.200.000.000	8.846.200.000.000	9.317.200.000.000	9.815.800.000.000
Kab. Sumenep	17.665.000.000.000	20.218.100.000.000	21.476.800.000.000	21.750.500.000.000	22.311.700.000.000
Kota. Kediri	63.185.100.000.000	65.408.800.000.000	69.232.900.000.000	72.945.500.000.000	76.959.400.000.000
Kota. Blitar	3.236.600.000.000	3.446.800.000.000	3.649.500.000.000	3.857.000.000.000	4.079.300.000.000
Kota. Malang	35.355.700.000.000	37.547.700.000.000	39.724.300.000.000	41.951.600.000.000	44.303.900.000.000
Kota. Probolinggo	5.552.100.000.000	5.911.300.000.000	6.261.900.000.000	6.629.100.000.000	7.018.300.000.000
Kota. Pasuruan	4.051.200.000.000	4.315.100.000.000	4.561.100.000.000	4.813.300.000.000	5.076.400.000.000
Kota. Mojokerto	3.358.400.000.000	3.566.700.000.000	3.774.500.000.000	3.991.100.000.000	4.221.500.000.000
Kota. Madiun	6.937.700.000.000	7.470.700.000.000	7.965.500.000.000	8.455.400.000.000	8.954.700.000.000
Kota. Surabaya	265.892.100.000.000	286.050.700.000.000	305.957.300.000.000	324.227.800.000.000	343.652.600.000.000
Kota. Batu	7.473.600.000.000	8.018.600.000.000	8.572.100.000.000	9.145.900.000.000	9.750.900.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2017 (data diolah)

LAMPIRAN B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Pacitan	57.298.239.683	62.988.926.126	101.276.945.022	126.449.078.417	150.466.067.821
Kab. Ponorogo	108.766.406.815	134.097.320.781	198.730.421.480	210.695.348.135	240.111.321.574
Kab. Trenggalek	70.197.613.639	77.799.518.146	132.951.069.332	155.254.334.899	182.174.291.709
Kab. Tulungagung	162.161.670.210	174.981.706.538	276.577.937.500	309.646.333.189	342.570.756.799
Kab. Blitar	95.782.155.449	115.670.863.817	188.827.430.091	216.648.256.570	224.106.765.169
Kab. Kediri	129.298.996.769	203.212.445.366	295.295.340.021	314.229.578.679	339.113.897.822
Kab. Malang	197.253.958.805	262.267.260.455	411.185.107.107	461.887.704.825	502.754.981.975
Kab. Lumajang	101.173.801.935	112.406.824.133	194.076.104.164	212.585.093.436	242.111.541.252
Kab. Jember	256.873.522.764	308.376.581.786	440.462.012.491	461.882.363.147	524.137.897.017
Kab. Banyuwangi	139.514.584.000	183.235.877.412	283.488.703.181	346.992.331.407	367.872.665.894
Kab. Bondowoso	77.846.177.657	79.559.722.884	134.684.701.402	158.974.210.144	177.025.949.242
Kab. Situbondo	67.050.480.515	78.043.407.932	129.640.577.934	148.507.958.983	173.836.184.925
Kab. Probolinggo	90.009.457.309	108.513.200.000	195.263.627.246	207.370.345.161	221.719.364.518
Kab. Pasuruan	194.858.675.371	278.165.169.902	421.442.629.861	478.269.057.788	480.758.720.671
Kab. Sidoarjo	669.617.556.904	853.433.670.218	1.115.332.938.500	1.266.786.627.409	1.335.283.958.793
Kab. Mojokerto	164.773.746.879	219.013.234.739	357.924.994.262	414.965.865.274	447.605.340.329
Kab. Jombang	164.389.353.735	185.091.678.240	304.065.301.093	363.963.252.972	374.141.185.826
Kab. Nganjuk	125.173.397.247	153.130.115.173	255.880.471.469	287.881.055.210	323.045.177.742
Kab. Madiun	68.545.790.751	83.428.636.455	121.390.771.374	149.628.355.468	163.635.265.621
Kab. Magetan	78.423.247.877	87.859.707.871	141.162.943.324	164.564.899.426	165.617.751.404

Kab. Ngawi	61.631.823.113	85.636.138.389	169.237.013.272	191.166.217.182	195.606.461.847
Kab. Bojonegoro	159.247.616.977	215.766.157.632	291.244.903.352	337.695.825.017	340.407.679.609
Kab. Tuban	192.499.442.880	227.120.525.358	291.079.944.393	345.965.620.446	364.133.296.890
Kab. Lamongan	129.284.733.136	161.087.916.085	272.409.285.216	321.667.133.176	403.474.462.147
Kab. Gresik	427.580.866.658	502.767.029.904	700.578.792.887	799.884.870.103	715.480.938.191
Kab. Bangkalan	80.268.572.727	92.722.219.766	135.785.489.734	175.624.054.291	200.073.202.554
Kab. Sampang	62.988.926.126	66.415.376.671	123.039.103.223	142.512.555.663	135.785.953.318
Kab. Pamekasan	84.377.021.981	89.462.536.536	171.518.204.167	170.258.936.684	178.478.890.964
Kab. Sumenep	85.886.851.769	97.052.073.113	162.371.865.154	172.687.320.521	208.982.186.961
Kota. Kediri	122.522.872.935	144.562.729.327	207.529.193.679	221.927.133.610	238.318.315.508
Kota. Blitar	63.640.945.339	72.853.545.668	102.757.907.576	121.264.917.468	131.920.190.721
Kota. Malang	229.810.290.000	317.772.985.191	372.545.396.292	424.938.755.525	477.541.556.465
Kota. Probolinggo	69.261.488.711	78.355.777.788	135.062.805.888	142.434.720.375	171.307.335.437
Kota. Pasuruan	42.367.716.434	66.110.651.059	100.647.029.803	114.734.243.910	147.818.815.719
Kota. Mojokerto	53.439.861.756	74.944.029.536	105.277.492.018	129.258.132.763	152.462.202.065
Kota. Madiun	72.030.950.610	96.011.481.200	134.584.344.293	164.681.136.058	173.235.929.828
Kota. Surabaya	2.279.613.848.833	2.791.580.050.710	3.307.323.863.978	4.035.649.478.398	4.090.206.769.388
Kota. Batu	38.794.059.670	59.544.940.728	80.493.920.959	104.233.584.925	1.095.333.498.034

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2017 (data diolah)

LAMPIRAN C. Dana Bagi Hasil (DBH) Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Pacitan	61.926.220.661	57.606.486.646	55.639.206.951	53.312.201.816	56.876.719.010
Kab. Ponorogo	77.026.589.709	60.528.483.123	63.196.253.581	61.758.662.053	68.100.582.458
Kab. Trenggalek	65.591.203.942	62.877.085.488	63.241.651.091	53.085.207.537	63.272.776.230
Kab. Tulungagung	87.290.311.195	82.463.824.043	71.137.985.704	59.885.008.859	67.563.768.280
Kab. Blitar	76.052.932.718	73.617.883.072	62.441.061.332	62.492.022.360	68.121.491.880
Kab. Kediri	123.728.046.063	90.983.489.039	95.324.429.696	92.488.394.457	97.026.501.597
Kab. Malang	147.598.457.110	148.938.981.220	129.756.776.025	126.719.045.923	145.219.916.051
Kab. Lumajang	66.464.357.796	60.946.140.007	64.996.007.111	70.183.805.205	69.373.241.617
Kab. Jember	109.449.896.708	96.881.881.256	119.173.767.217	131.764.719.546	119.486.580.155
Kab. Banyuwangi	101.183.454.103	82.372.387.226	85.075.009.719	78.910.883.224	89.415.397.750
Kab. Bondowoso	64.341.603.915	63.585.836.840	66.690.180.156	66.546.036.581	71.334.375.370
Kab. Situbondo	64.846.435.314	65.745.895.740	71.518.089.794	69.352.663.479	49.403.244.318
Kab. Probolinggo	99.188.310.307	91.067.128.028	58.107.302.195	90.092.853.769	95.147.640.501
Kab. Pasuruan	145.203.602.805	137.122.324.045	1.253.192.693.993	228.584.521.012	274.973.151.548
Kab. Sidoarjo	163.493.008.351	152.154.775.099	145.046.925.170	121.320.183.033	157.448.130.456
Kab. Mojokerto	104.814.609.731	82.983.320.420	73.503.004.301	72.503.004.301	80.808.790.924
Kab. Jombang	93.684.408.900	96.238.306.863	76.832.644.695	75.132.309.685	85.303.667.270
Kab. Nganjuk	85.905.532.376	84.730.119.231	77.274.457.734	65.782.737.647	76.916.649.574
Kab. Madiun	66.621.669.930	62.322.687.548	57.681.958.564	57.379.974.782	61.283.188.512
Kab. Magetan	59.663.383.953	59.508.145.662	54.279.901.618	49.911.643.300	56.654.834.149

Kab. Ngawi	76.981.860.056	71.944.950.505	70.152.944.031	64.431.897.211	74.196.426.014
Kab. Bojonegoro	584.651.305.357	553.156.843.378	796.681.997.014	994.881.177.034	909.808.298.244
Kab. Tuban	138.930.824.204	114.763.665.881	114.084.687.742	118.628.426.001	118.421.225.440
Kab. Lamongan	103.838.553.310	105.456.239.964	89.791.289.838	95.412.623.093	98.267.648.131
Kab. Gresik	153.246.269.810	142.187.422.935	129.851.244.150	119.825.600.654	149.468.790.400
Kab. Bangkalan	119.959.498.534	112.261.892.699	94.751.334.394	84.867.656.511	88.884.112.050
Kab. Sampang	91.484.925.430	83.650.526.417	75.015.909.243	71.773.051.733	74.204.892.211
Kab. Pamekasan	105.738.199.617	65.291.189.637	94.870.232.351	92.560.017.582	91.983.362.313
Kab. Sumenep	181.162.631.154	176.065.942.883	171.384.264.333	125.203.363.697	129.042.821.568
Kota. Kediri	119.023.129.587	108.070.739.199	118.165.747.381	112.202.429.166	125.649.030.826
Kota. Blitar	52.898.747.755	49.307.449.289	53.795.745.257	49.308.924.393	56.541.040.622
Kota. Malang	130.330.583.810	86.734.213.965	116.943.891.132	87.015.121.783	114.874.411.979
Kota. Probolinggo	57.969.915.223	48.536.474.850	54.015.790.981	53.262.028.083	59.828.576.539
Kota. Pasuruan	51.554.911.894	46.163.342.634	52.592.541.564	52.331.112.233	51.513.313.785
Kota. Mojokerto	54.904.848.712	45.381.463.215	39.502.270.641	50.992.997.791	55.436.957.047
Kota. Madiun	60.299.813.832	54.983.424.555	62.203.043.742	47.534.167.294	65.339.045.850
Kota. Surabaya	318.214.603.897	270.937.496.629	267.630.863.545	230.261.248.683	412.788.910.654
Kota. Batu	50.113.541.744	48.793.825.437	59.265.138.265	49.212.551.211	51.317.087.281

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2017 (data diolah)

LAMPIRAN D. Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Pacitan	589.829.914.000	647.293.403.000	700.743.024.000	714.847.233.000	807.907.686.000
Kab. Ponorogo	779.077.679.000	890.922.311.000	970.788.118.000	993.319.105.000	1.062.582.799.000
Kab. Trenggalek	654.342.618.000	737.814.627.000	815.508.143.000	839.497.985.000	901.379.781.000
Kab. Tulungagung	878.221.208.000	996.300.694.000	1.083.859.022.000	1.111.457.117.000	1.087.634.489.000
Kab. Blitar	845.117.933.000	944.297.542.000	1.027.251.687.000	1.037.991.125.000	1.128.511.321.000
Kab. Kediri	925.532.895.000	1.056.481.076.000	1.144.878.533.000	1.177.392.295.000	1.242.230.783.000
Kab. Malang	1.281.612.867.000	1.439.234.034.000	1.572.191.571.000	1.613.161.777.000	1.694.884.660.000
Kab. Lumajang	736.273.129.000	828.524.528.000	898.217.627.000	923.492.395.000	990.248.409.000
Kab. Jember	1.279.295.764.000	1.417.603.982.000	1.539.722.508.000	1.586.836.602.000	1.709.892.845.000
Kab. Banyuwangi	1.030.217.037.000	1.154.495.171.000	1.254.496.229.000	1.288.940.680.000	1.400.384.500.000
Kab. Bondowoso	666.857.212.000	752.776.704.000	821.583.706.000	862.599.540.000	926.596.442.000
Kab. Situbondo	616.093.730.000	692.549.026.000	776.542.999.000	787.728.919.000	821.084.393.000
Kab. Probolinggo	761.569.639.000	848.994.313.000	929.380.602.000	956.969.595.000	977.570.137.000
Kab. Pasuruan	876.731.942.000	992.689.474.000	1.068.868.861.000	1.089.359.282.000	1.200.611.830.000
Kab. Sidoarjo	974.570.533.000	1.104.580.340.000	1.199.036.154.000	1.206.659.789.000	1.225.261.302.000
Kab. Mojokerto	733.782.205.000	832.266.682.000	899.109.179.000	923.747.632.000	991.180.363.000
Kab. Jombang	809.295.635.000	920.097.938.000	1.007.166.193.000	1.032.325.237.000	1.111.301.450.000
Kab. Nganjuk	827.298.802.000	928.265.611.000	1.004.037.764.000	1.024.223.014.000	1.078.695.643.000
Kab. Madiun	645.865.489.000	734.152.390.000	808.842.790.000	832.357.223.000	893.565.762.000
Kab. Magetan	677.454.353.000	761.637.391.000	840.086.597.000	856.278.521.000	918.553.464.000

Kab. Ngawi	796.833.553.000	897.111.395.000	980.530.132.000	995.119.303.000	1.058.208.375.000
Kab. Bojonegoro	785.584.826.000	876.021.914.000	920.522.357.000	1.024.223.014.000	949.118.065.000
Kab. Tuban	757.906.831.000	849.399.312.000	926.685.197.000	955.939.873.000	1.046.758.509.000
Kab. Lamongan	832.015.926.000	958.334.988.000	1.042.124.514.000	1.064.300.915.000	1.166.655.654.000
Kab. Gresik	711.868.321.000	804.903.511.000	863.397.519.000	873.265.959.000	923.469.024.000
Kab. Bangkalan	700.513.200.000	778.024.112.000	854.873.885.000	888.673.426.000	1.012.242.530.000
Kab. Sampang	603.996.470.000	683.242.704.000	753.954.218.000	788.345.170.000	827.952.746.000
Kab. Pamekasan	625.872.640.000	702.610.217.000	786.617.777.000	817.903.633.000	882.935.587.000
Kab. Sumenep	807.976.168.000	917.539.019.000	984.839.445.000	1.010.159.421.000	1.110.487.853.000
Kota. Kediri	490.371.763.000	562.943.089.000	634.351.539.000	634.461.169.000	617.780.644.000
Kota. Blitar	315.773.358.000	355.673.006.000	392.221.991.000	400.654.035.000	428.743.959.000
Kota. Malang	665.927.808.000	746.686.937.000	808.447.824.000	818.758.893.000	859.678.208.000
Kota. Probolinggo	367.601.263.000	414.534.284.000	454.203.196.000	463.649.666.000	470.212.966.000
Kota. Pasuruan	319.424.821.000	353.127.853.000	391.843.124.000	399.095.322.000	432.090.225.000
Kota. Mojokerto	309.102.871.000	354.452.407.000	380.779.789.000	382.373.637.000	397.094.498.000
Kota. Madiun	413.003.782.000	474.093.362.000	511.089.913.000	509.817.165.000	511.375.289.000
Kota. Surabaya	1.061.625.528.000	1.160.025.693.000	1.200.889.359.000	1.147.385.486.000	1.233.380.404.000
Kota. Batu	324.768.945.000	374.362.261.000	412.378.255.000	413.219.693.000	480.460.016.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2017 (data diolah)

LAMPIRAN D. Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Pacitan	589.829.914.000	647.293.403.000	700.743.024.000	714.847.233.000	807.907.686.000
Kab. Ponorogo	779.077.679.000	890.922.311.000	970.788.118.000	993.319.105.000	1.062.582.799.000
Kab. Trenggalek	654.342.618.000	737.814.627.000	815.508.143.000	839.497.985.000	901.379.781.000
Kab. Tulungagung	878.221.208.000	996.300.694.000	1.083.859.022.000	1.111.457.117.000	1.087.634.489.000
Kab. Blitar	845.117.933.000	944.297.542.000	1.027.251.687.000	1.037.991.125.000	1.128.511.321.000
Kab. Kediri	925.532.895.000	1.056.481.076.000	1.144.878.533.000	1.177.392.295.000	1.242.230.783.000
Kab. Malang	1.281.612.867.000	1.439.234.034.000	1.572.191.571.000	1.613.161.777.000	1.694.884.660.000
Kab. Lumajang	736.273.129.000	828.524.528.000	898.217.627.000	923.492.395.000	990.248.409.000
Kab. Jember	1.279.295.764.000	1.417.603.982.000	1.539.722.508.000	1.586.836.602.000	1.709.892.845.000
Kab. Banyuwangi	1.030.217.037.000	1.154.495.171.000	1.254.496.229.000	1.288.940.680.000	1.400.384.500.000
Kab. Bondowoso	666.857.212.000	752.776.704.000	821.583.706.000	862.599.540.000	926.596.442.000
Kab. Situbondo	616.093.730.000	692.549.026.000	776.542.999.000	787.728.919.000	821.084.393.000
Kab. Probolinggo	761.569.639.000	848.994.313.000	929.380.602.000	956.969.595.000	977.570.137.000
Kab. Pasuruan	876.731.942.000	992.689.474.000	1.068.868.861.000	1.089.359.282.000	1.200.611.830.000
Kab. Sidoarjo	974.570.533.000	1.104.580.340.000	1.199.036.154.000	1.206.659.789.000	1.225.261.302.000
Kab. Mojokerto	733.782.205.000	832.266.682.000	899.109.179.000	923.747.632.000	991.180.363.000
Kab. Jombang	809.295.635.000	920.097.938.000	1.007.166.193.000	1.032.325.237.000	1.111.301.450.000
Kab. Nganjuk	827.298.802.000	928.265.611.000	1.004.037.764.000	1.024.223.014.000	1.078.695.643.000
Kab. Madiun	645.865.489.000	734.152.390.000	808.842.790.000	832.357.223.000	893.565.762.000
Kab. Magetan	677.454.353.000	761.637.391.000	840.086.597.000	856.278.521.000	918.553.464.000

Kab. Ngawi	796.833.553.000	897.111.395.000	980.530.132.000	995.119.303.000	1.058.208.375.000
Kab. Bojonegoro	785.584.826.000	876.021.914.000	920.522.357.000	1.024.223.014.000	949.118.065.000
Kab. Tuban	757.906.831.000	849.399.312.000	926.685.197.000	955.939.873.000	1.046.758.509.000
Kab. Lamongan	832.015.926.000	958.334.988.000	1.042.124.514.000	1.064.300.915.000	1.166.655.654.000
Kab. Gresik	711.868.321.000	804.903.511.000	863.397.519.000	873.265.959.000	923.469.024.000
Kab. Bangkalan	700.513.200.000	778.024.112.000	854.873.885.000	888.673.426.000	1.012.242.530.000
Kab. Sampang	603.996.470.000	683.242.704.000	753.954.218.000	788.345.170.000	827.952.746.000
Kab. Pamekasan	625.872.640.000	702.610.217.000	786.617.777.000	817.903.633.000	882.935.587.000
Kab. Sumenep	807.976.168.000	917.539.019.000	984.839.445.000	1.010.159.421.000	1.110.487.853.000
Kota. Kediri	490.371.763.000	562.943.089.000	634.351.539.000	634.461.169.000	617.780.644.000
Kota. Blitar	315.773.358.000	355.673.006.000	392.221.991.000	400.654.035.000	428.743.959.000
Kota. Malang	665.927.808.000	746.686.937.000	808.447.824.000	818.758.893.000	859.678.208.000
Kota. Probolinggo	367.601.263.000	414.534.284.000	454.203.196.000	463.649.666.000	470.212.966.000
Kota. Pasuruan	319.424.821.000	353.127.853.000	391.843.124.000	399.095.322.000	432.090.225.000
Kota. Mojokerto	309.102.871.000	354.452.407.000	380.779.789.000	382.373.637.000	397.094.498.000
Kota. Madiun	413.003.782.000	474.093.362.000	511.089.913.000	509.817.165.000	511.375.289.000
Kota. Surabaya	1.061.625.528.000	1.160.025.693.000	1.200.889.359.000	1.147.385.486.000	1.233.380.404.000
Kota. Batu	324.768.945.000	374.362.261.000	412.378.255.000	413.219.693.000	480.460.016.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2017 (data diolah)

LAMPIRAN F. Data Perkembangan PDRB, PAD, DBH, DAU, DAK Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012-2016

Tahun	Kabupaten/kota	PDRB (Rupiah)	PAD (Rupiah)	DBH (Rupiah)	DAU (Rupiah)	DAK (Rupiah)
2012	Kab. Pacitan	7.705.000.000.000	57.298.239.683	61.926.220.661	589.829.914.000	51.724.730.000
2013	Kab. Pacitan	8.157.600.000.000	62.988.926.126	57.606.486.646	647.293.403.000	51.937.520.000
2014	Kab. Pacitan	8.582.200.000.000	101.276.945.022	55.639.206.951	700.743.024.000	51.869.860.000
2015	Kab. Pacitan	9.019.500.000.000	126.449.078.417	53.312.201.816	714.847.233.000	95.364.070.000
2016	Kab. Pacitan	9.489.100.000.000	150.466.067.821	56.876.719.010	807.907.686.000	222.388.548.658
2012	Kab. Ponorogo	10.038.400.000.000	108.766.406.815	77.026.589.709	779.077.679.000	62.386.740.000
2013	Kab. Ponorogo	10.554.500.000.000	134.097.320.781	60.528.483.123	890.922.311.000	65.307.550.000
2014	Kab. Ponorogo	11.104.500.000.000	198.730.421.480	63.196.253.581	970.788.118.000	65.691.470.000
2015	Kab. Ponorogo	11.687.900.000.000	210.695.348.135	61.758.662.053	993.319.105.000	89.213.600.000
2016	Kab. Ponorogo	12.305.700.000.000	240.111.321.574	68.100.582.458	1.062.582.799.000	325.256.416.313
2012	Kab. Trenggalek	8.959.500.000.000	70.197.613.639	65.591.203.942	654.342.618.000	53.829.880.000
2013	Kab. Trenggalek	9.496.700.000.000	77.799.518.146	62.877.085.488	737.814.627.000	64.974.660.000
2014	Kab. Trenggalek	9.998.400.000.000	132.951.069.332	63.241.651.091	815.508.143.000	61.684.690.000
2015	Kab. Trenggalek	10.500.800.000.000	155.254.334.899	53.085.207.537	839.497.985.000	84.488.400.000
2016	Kab. Trenggalek	11.026.500.000.000	182.174.291.709	63.272.776.230	901.379.781.000	215.430.789.000
2012	Kab. Tulungagung	18.999.000.000.000	162.161.670.210	87.290.311.195	878.221.208.000	68.674.420.000
2013	Kab. Tulungagung	20.164.300.000.000	174.981.706.538	82.463.824.043	996.300.694.000	71.687.640.000
2014	Kab. Tulungagung	21.265.200.000.000	276.577.937.500	71.137.985.704	1.083.859.022.000	73.752.100.000
2015	Kab. Tulungagung	22.326.600.000.000	309.646.333.189	59.885.008.859	1.111.457.117.000	110.360.560.000
2016	Kab. Tulungagung	23.446.400.000.000	342.570.756.799	67.563.768.280	1.087.634.489.000	319.305.844.000

2012	Kab. Blitar	18.054.500.000.000	95.782.155.449	76.052.932.718	845.117.933.000	51.064.455.000
2013	Kab. Blitar	18.967.300.000.000	115.670.863.817	73.617.883.072	944.297.542.000	70.322.560.000
2014	Kab. Blitar	19.920.200.000.000	188.827.430.091	62.441.061.332	1.027.251.687.000	71.417.130.000
2015	Kab. Blitar	20.925.500.000.000	216.648.256.570	62.492.022.360	1.037.991.125.000	142.410.070.000
2016	Kab. Blitar	21.991.400.000.000	224.106.765.169	68.121.491.880	1.128.511.321.000	402.370.805.555
2012	Kab. Kediri	20.535.300.000.000	129.298.996.769	123.728.046.063	925.532.895.000	102.056.870.000
2013	Kab. Kediri	21.730.500.000.000	203.212.445.366	90.983.489.039	1.056.481.076.000	69.281.810.000
2014	Kab. Kediri	22.886.300.000.000	295.295.340.021	95.324.429.696	1.144.878.533.000	51.359.505.000
2015	Kab. Kediri	24.002.300.000.000	314.229.578.679	92.488.394.457	1.177.392.295.000	75.493.736.000
2016	Kab. Kediri	25.211.900.000.000	339.113.897.822	97.026.501.597	1.242.230.783.000	308.559.509.050
2012	Kab. Malang	47.075.700.000.000	197.253.958.805	147.598.457.110	1.281.612.867.000	118.237.360.000
2013	Kab. Malang	49.571.400.000.000	262.267.260.455	148.938.981.220	1.439.234.034.000	112.312.350.000
2014	Kab. Malang	52.549.300.000.000	411.185.107.107	129.756.776.025	1.572.191.571.000	130.050.580.000
2015	Kab. Malang	55.316.000.000.000	461.887.704.825	126.719.045.923	1.613.161.777.000	153.350.440.000
2016	Kab. Malang	58.247.300.000.000	502.754.981.975	145.219.916.051	1.694.884.660.000	468.164.701.980
2012	Kab. Lumajang	16.053.400.000.000	101.173.801.935	66.464.357.796	736.273.129.000	48.874.360.000
2013	Kab. Lumajang	16.949.600.000.000	112.406.824.133	60.946.140.007	828.524.528.000	44.000.685.000
2014	Kab. Lumajang	17.852.100.000.000	194.076.104.164	64.996.007.111	898.217.627.000	51.943.373.000
2015	Kab. Lumajang	18.677.700.000.000	212.585.093.436	70.183.805.205	923.492.395.000	74.273.112.000
2016	Kab. Lumajang	19.555.200.000.000	242.111.541.252	69.373.241.617	990.248.409.000	226.540.755.000
2012	Kab. Jember	37.262.000.000.000	256.873.522.764	109.449.896.708	1.279.295.764.000	95.364.740.000
2013	Kab. Jember	39.519.200.000.000	308.376.581.786	96.881.881.256	1.417.603.982.000	74.410.890.000
2014	Kab. Jember	41.968.800.000.000	440.462.012.491	119.173.767.217	1.539.722.508.000	87.951.090.000
2015	Kab. Jember	44.204.100.000.000	461.882.363.147	131.764.719.546	1.586.836.602.000	199.158.010.000

2016	Kab. Jember	46.526.600.000.000	524.137.897.017	119.486.580.155	1.709.892.845.000	429.698.098.000
2012	Kab. Banyuwangi	37.235.700.000.000	139.514.584.000	101.183.454.103	1.030.217.037.000	67.656.190.000
2013	Kab. Banyuwangi	39.733.600.000.000	183.235.877.412	82.372.387.226	1.154.495.171.000	76.997.760.000
2014	Kab. Banyuwangi	41.997.600.000.000	283.488.703.181	85.075.009.719	1.254.496.229.000	48.040.230.000
2015	Kab. Banyuwangi	44.523.500.000.000	346.992.331.407	78.910.883.224	1.288.940.680.000	126.464.240.000
2016	Kab. Banyuwangi	46.924.600.000.000	367.872.665.894	89.415.397.750	1.400.384.500.000	357.337.495.217
2012	Kab. Bondowoso	9.583.400.000.000	77.846.177.657	64.341.603.915	666.857.212.000	65.417.780.000
2013	Kab. Bondowoso	10.140.100.000.000	79.559.722.884	63.585.836.840	752.776.704.000	80.710.600.000
2014	Kab. Bondowoso	10.651.900.000.000	134.684.701.402	66.690.180.156	821.583.706.000	91.063.070.000
2015	Kab. Bondowoso	11.178.700.000.000	158.974.210.144	66.546.036.581	862.599.540.000	122.444.580.000
2016	Kab. Bondowoso	11.735.600.000.000	177.025.949.242	71.334.375.370	926.596.442.000	45.859.978.912
2012	Kab. Situbondo	9.411.600.000.000	67.050.480.515	64.846.435.314	616.093.730.000	66.718.400.000
2013	Kab. Situbondo	9.993.800.000.000	78.043.407.932	65.745.895.740	692.549.026.000	81.427.290.000
2014	Kab. Situbondo	10.572.400.000.000	129.640.577.934	71.518.089.794	776.542.999.000	92.702.040.000
2015	Kab. Situbondo	11.086.500.000.000	148.507.958.983	69.352.663.479	787.728.919.000	116.454.810.000
2016	Kab. Situbondo	11.640.800.000.000	173.836.184.925	49.403.244.318	821.084.393.000	220.197.273.782
2012	Kab. Probolinggo	16.936.800.000.000	90.009.457.309	99.188.310.307	761.569.639.000	76.672.760.000
2013	Kab. Probolinggo	17.808.900.000.000	108.513.200.000	91.067.128.028	848.994.313.000	62.235.420.000
2014	Kab. Probolinggo	18.681.300.000.000	195.263.627.246	58.107.302.195	929.380.602.000	69.707.430.000
2015	Kab. Probolinggo	19.570.400.000.000	207.370.345.161	90.092.853.769	956.969.595.000	78.887.940.000
2016	Kab. Probolinggo	20.504.100.000.000	221.719.364.518	95.147.640.501	977.570.137.000	248.073.366.798
2012	Kab. Pasuruan	70.155.200.000.000	194.858.675.371	145.203.602.805	876.731.942.000	66.238.310.000
2013	Kab. Pasuruan	75.031.900.000.000	278.165.169.902	137.122.324.045	992.689.474.000	77.421.870.000
2014	Kab. Pasuruan	80.093.200.000.000	421.442.629.861	1.253.192.693.993	1.068.868.861.000	83.588.340.000

2015	Kab. Pasuruan	84.399.800.000.000	478.269.057.788	228.584.521.012	1.089.359.282.000	72.940.100.000
2016	Kab. Pasuruan	89.011.200.000.000	480.758.720.671	274.973.151.548	1.200.611.830.000	356.153.803.649
2012	Kab. Sidoarjo	93.403.700.000.000	669.617.556.904	163.493.008.351	974.570.533.000	63.877.470.000
2013	Kab. Sidoarjo	99.872.300.000.000	853.433.670.218	152.154.775.099	1.104.580.340.000	54.281.080.000
2014	Kab. Sidoarjo	106.294.400.000.000	1.115.332.938.500	145.046.925.170	1.199.036.154.000	58.852.358.000
2015	Kab. Sidoarjo	111.884.200.000.000	1.266.786.627.409	121.320.183.033	1.206.659.789.000	60.659.030.000
2016	Kab. Sidoarjo	118.179.200.000.000	1.335.283.958.793	157.448.130.456	1.225.261.302.000	306.961.326.663
2012	Kab. Mojokerto	39.046.000.000.000	164.773.746.879	104.814.609.731	733.782.205.000	50.645.610.000
2013	Kab. Mojokerto	41.607.100.000.000	219.013.234.739	82.983.320.420	832.266.682.000	35.577.547.000
2014	Kab. Mojokerto	44.290.700.000.000	357.924.994.262	73.503.004.301	899.109.179.000	55.556.660.000
2015	Kab. Mojokerto	46.792.400.000.000	414.965.865.274	72.503.004.301	923.747.632.000	83.127.250.000
2016	Kab. Mojokerto	49.321.900.000.000	447.605.340.329	80.808.790.924	991.180.363.000	243.361.285.520
2012	Kab. Jombang	19.514.800.000.000	164.389.353.735	93.684.408.900	809.295.635.000	94.467.880.000
2013	Kab. Jombang	20.672.300.000.000	185.091.678.240	96.238.306.863	920.097.938.000	43.717.035.000
2014	Kab. Jombang	21.793.200.000.000	304.065.301.093	76.832.644.695	1.007.166.193.000	47.292.080.000
2015	Kab. Jombang	22.960.200.000.000	363.963.252.972	75.132.309.685	1.032.325.237.000	63.325.130.000
2016	Kab. Jombang	24.199.100.000.000	374.141.185.826	85.303.667.270	1.111.301.450.000	282.874.988.590
2012	Kab. Nganjuk	12.767.000.000.000	125.173.397.247	85.905.532.376	827.298.802.000	58.366.860.000
2013	Kab. Nganjuk	13.456.000.000.000	153.130.115.173	84.730.119.231	928.265.611.000	59.433.923.000
2014	Kab. Nganjuk	14.142.600.000.000	255.880.471.469	77.274.457.734	1.004.037.764.000	50.838.968.000
2015	Kab. Nganjuk	14.875.700.000.000	287.881.055.210	65.782.737.647	1.024.223.014.000	76.950.740.000
2016	Kab. Nganjuk	15.661.800.000.000	323.045.177.742	76.916.649.574	1.078.695.643.000	282.445.514.114
2012	Kab. Madiun	9.132.900.000.000	68.545.790.751	66.621.669.930	645.865.489.000	49.168.360.000
2013	Kab. Madiun	9.651.200.000.000	83.428.636.455	62.322.687.548	734.152.390.000	51.129.000.000

2014	Kab. Madiun	10.166.700.000.000	121.390.771.374	57.681.958.564	808.842.790.000	62.841.120.000
2015	Kab. Madiun	10.702.000.000.000	149.628.355.468	57.379.974.782	832.357.223.000	128.123.730.000
2016	Kab. Madiun	11.268.900.000.000	163.635.265.621	61.283.188.512	893.565.762.000	332.025.736.458
2012	Kab. Magetan	9.251.200.000.000	78.423.247.877	59.663.383.953	677.454.353.000	54.252.590.000
2013	Kab. Magetan	9.792.600.000.000	87.859.707.871	59.508.145.662	761.637.391.000	46.164.370.000
2014	Kab. Magetan	10.292.400.000.000	141.162.943.324	54.279.901.618	840.086.597.000	58.964.980.000
2015	Kab. Magetan	10.824.100.000.000	164.564.899.426	49.911.643.300	856.278.521.000	79.395.670.000
2016	Kab. Magetan	11.398.100.000.000	165.617.751.404	56.654.834.149	918.553.464.000	95.772.702.639
2012	Kab. Ngawi	9.567.500.000.000	61.631.823.113	76.981.860.056	796.833.553.000	63.804.470.000
2013	Kab. Ngawi	10.093.200.000.000	85.636.138.389	71.944.950.505	897.111.395.000	71.219.840.000
2014	Kab. Ngawi	10.680.200.000.000	169.237.013.272	70.152.944.031	980.530.132.000	65.997.050.000
2015	Kab. Ngawi	11.223.200.000.000	191.166.217.182	64.431.897.211	995.119.303.000	104.967.240.000
2016	Kab. Ngawi	11.807.600.000.000	195.606.461.847	74.196.426.014	1.058.208.375.000	335.763.929.383
2012	Kab. Bojonegoro	18.971.000.000.000	159.247.616.977	584.651.305.357	785.584.826.000	68.347.170.000
2013	Kab. Bojonegoro	20.390.100.000.000	215.766.157.632	553.156.843.378	876.021.914.000	46.545.623.000
2014	Kab. Bojonegoro	21.625.400.000.000	291.244.903.352	796.681.997.014	920.522.357.000	44.549.378.000
2015	Kab. Bojonegoro	22.858.600.000.000	337.695.825.017	994.881.177.034	1.024.223.014.000	67.346.180.000
2016	Kab. Bojonegoro	57.187.400.000.000	340.407.679.609	909.808.298.244	949.118.065.000	135.279.268.459
2012	Kab. Tuban	31.816.300.000.000	192.499.442.880	138.930.824.204	757.906.831.000	49.806.830.000
2013	Kab. Tuban	33.678.800.000.000	227.120.525.358	114.763.665.881	849.399.312.000	49.173.770.000
2014	Kab. Tuban	35.519.400.000.000	291.079.944.393	114.084.687.742	926.685.197.000	48.566.930.000
2015	Kab. Tuban	37.254.700.000.000	345.965.620.446	118.628.426.001	955.939.873.000	66.605.040.000
2016	Kab. Tuban	39.081.800.000.000	364.133.296.890	118.421.225.440	1.046.758.509.000	278.716.212.843
2012	Kab. Lamongan	18.562.700.000.000	129.284.733.136	103.838.553.310	832.015.926.000	70.832.240.000

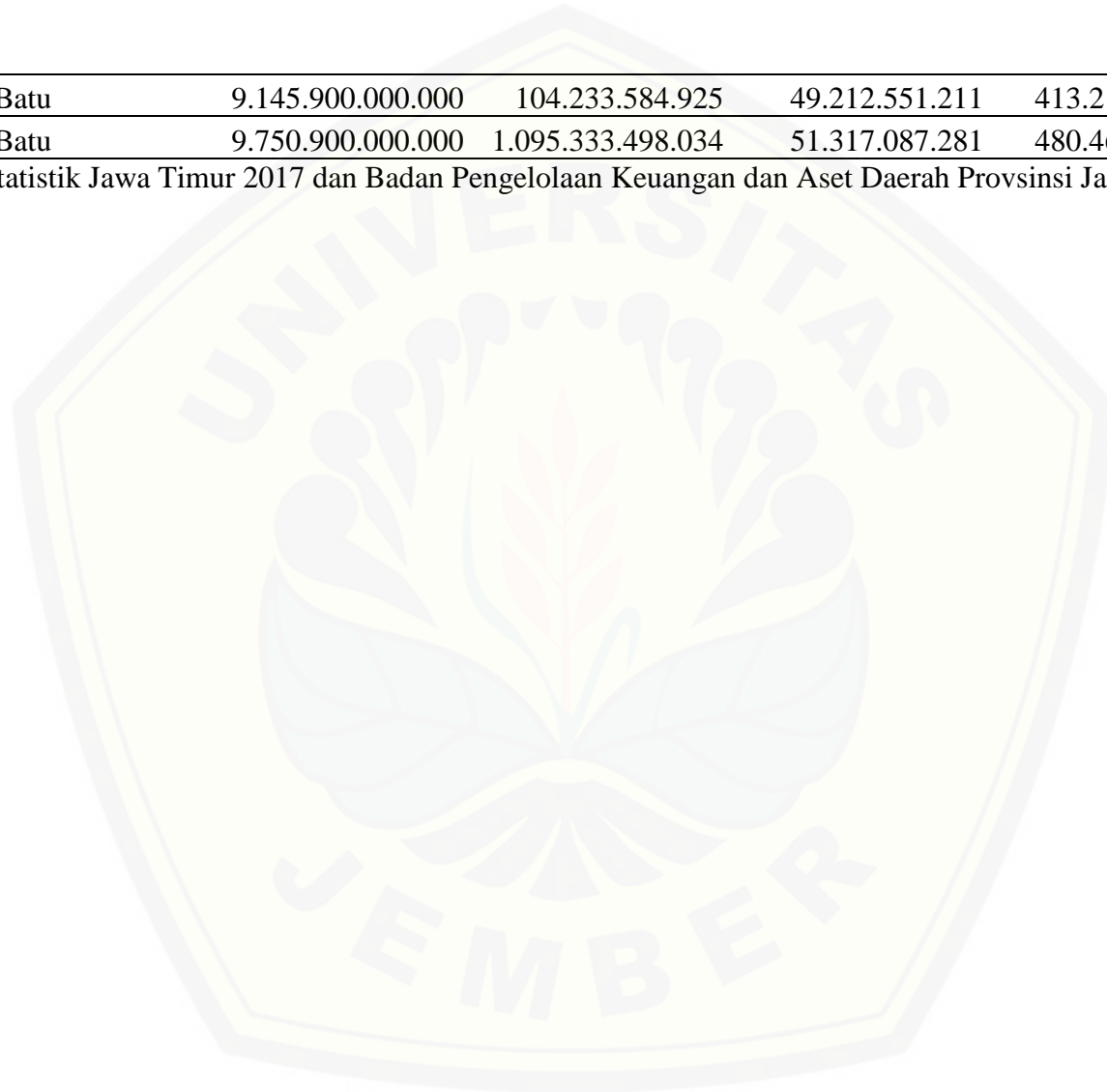
2013	Kab. Lamongan	19.848.800.000.000	161.087.916.085	105.456.239.964	958.334.988.000	75.665.880.000
2014	Kab. Lamongan	21.100.100.000.000	272.409.285.216	89.791.289.838	1.042.124.514.000	77.845.000.000
2015	Kab. Lamongan	22.316.800.000.000	321.667.133.176	95.412.623.093	1.064.300.915.000	154.244.850.000
2016	Kab. Lamongan	23.623.800.000.000	403.474.462.147	98.267.648.131	1.166.655.654.000	443.757.061.800
2012	Kab. Gresik	67.248.800.000.000	427.580.866.658	153.246.269.810	711.868.321.000	82.505.060.000
2013	Kab. Gresik	71.314.200.000.000	502.767.029.904	142.187.422.935	804.903.511.000	49.106.160.000
2014	Kab. Gresik	76.336.700.000.000	700.578.792.887	129.851.244.150	863.397.519.000	72.051.260.000
2015	Kab. Gresik	81.359.400.000.000	799.884.870.103	119.825.600.654	873.265.959.000	110.844.780.000
2016	Kab. Gresik	85.835.100.000.000	715.480.938.191	149.468.790.400	923.469.024.000	263.751.189.350
2012	Kab. Bangkalan	16.173.700.000.000	80.268.572.727	119.959.498.534	700.513.200.000	71.355.490.000
2013	Kab. Bangkalan	16.204.000.000.000	92.722.219.766	112.261.892.699	778.024.112.000	105.241.400.000
2014	Kab. Bangkalan	17.369.800.000.000	135.785.489.734	94.751.334.394	854.873.885.000	98.985.480.000
2015	Kab. Bangkalan	16.907.100.000.000	175.624.054.291	84.867.656.511	888.673.426.000	211.121.740.000
2016	Kab. Bangkalan	17.018.600.000.000	200.073.202.554	88.884.112.050	1.012.242.530.000	253.397.903.000
2012	Kab. Sampang	10.910.900.000.000	62.988.926.126	91.484.925.430	603.996.470.000	72.170.450.000
2013	Kab. Sampang	11.623.800.000.000	66.415.376.671	83.650.526.417	683.242.704.000	105.384.510.000
2014	Kab. Sampang	11.632.900.000.000	123.039.103.223	75.015.909.243	753.954.218.000	91.197.080.000
2015	Kab. Sampang	11.874.500.000.000	142.512.555.663	71.773.051.733	788.345.170.000	204.576.570.000
2016	Kab. Sampang	12.606.800.000.000	135.785.953.318	74.204.892.211	827.952.746.000	328.941.810.494
2012	Kab. Pamekasan	7.894.000.000.000	84.377.021.981	105.738.199.617	625.872.640.000	61.093.880.000
2013	Kab. Pamekasan	8.375.200.000.000	89.462.536.536	65.291.189.637	702.610.217.000	97.071.780.000
2014	Kab. Pamekasan	8.846.200.000.000	171.518.204.167	94.870.232.351	786.617.777.000	101.518.990.000
2015	Kab. Pamekasan	9.317.200.000.000	170.258.936.684	92.560.017.582	817.903.633.000	143.369.090.000
2016	Kab. Pamekasan	9.815.800.000.000	178.478.890.964	91.983.362.313	882.935.587.000	346.060.851.131

2012	Kab. Sumenep	17.665.000.000.000	85.886.851.769	181.162.631.154	807.976.168.000	67.924.850.000
2013	Kab. Sumenep	20.218.100.000.000	97.052.073.113	176.065.942.883	917.539.019.000	79.219.770.000
2014	Kab. Sumenep	21.476.800.000.000	162.371.865.154	171.384.264.333	984.839.445.000	63.570.200.000
2015	Kab. Sumenep	21.750.500.000.000	172.687.320.521	125.203.363.697	1.010.159.421.000	177.609.160.000
2016	Kab. Sumenep	22.311.700.000.000	208.982.186.961	129.042.821.568	1.110.487.853.000	281.364.415.107
2012	Kota. Kediri	63.185.100.000.000	122.522.872.935	119.023.129.587	490.371.763.000	42.410.000.000
2013	Kota. Kediri	65.408.800.000.000	144.562.729.327	108.070.739.199	562.943.089.000	29.999.610.000
2014	Kota. Kediri	69.232.900.000.000	207.529.193.679	118.165.747.381	634.351.539.000	26.235.240.000
2015	Kota. Kediri	72.945.500.000.000	221.927.133.610	112.202.429.166	634.461.169.000	27.423.652.000
2016	Kota. Kediri	76.959.400.000.000	238.318.315.508	125.649.030.826	617.780.644.000	74.843.169.000
2012	Kota. Blitar	3.236.600.000.000	63.640.945.339	52.898.747.755	315.773.358.000	17.527.970.000
2013	Kota. Blitar	3.446.800.000.000	72.853.545.668	49.307.449.289	355.673.006.000	29.707.730.000
2014	Kota. Blitar	3.649.500.000.000	102.757.907.576	53.795.745.257	392.221.991.000	28.707.730.000
2015	Kota. Blitar	3.857.000.000.000	121.264.917.468	49.308.924.393	400.654.035.000	33.381.736.000
2016	Kota. Blitar	4.079.300.000.000	131.920.190.721	56.541.040.622	428.743.959.000	137.391.098.119
2012	Kota. Malang	35.355.700.000.000	229.810.290.000	130.330.583.810	665.927.808.000	21.897.310.000
2013	Kota. Malang	37.547.700.000.000	317.772.985.191	86.734.213.965	746.686.937.000	30.315.710.000
2014	Kota. Malang	39.724.300.000.000	372.545.396.292	116.943.891.132	808.447.824.000	31.304.060.000
2015	Kota. Malang	41.951.600.000.000	424.938.755.525	87.015.121.783	818.758.893.000	20.590.560.000
2016	Kota. Malang	44.303.900.000.000	477.541.556.465	114.874.411.979	859.678.208.000	94.813.827.000
2012	Kota. Probolinggo	5.552.100.000.000	69.261.488.711	57.969.915.223	367.601.263.000	32.816.170.000
2013	Kota. Probolinggo	5.911.300.000.000	78.355.777.788	48.536.474.850	414.534.284.000	32.341.470.000
2014	Kota. Probolinggo	6.261.900.000.000	135.062.805.888	54.015.790.981	454.203.196.000	24.483.458.000
2015	Kota. Probolinggo	6.629.100.000.000	142.434.720.375	53.262.028.083	463.649.666.000	38.181.304.000

2016	Kota. Probolinggo	7.018.300.000.000	171.307.335.437	59.828.576.539	470.212.966.000	83.332.171.500
2012	Kota. Pasuruan	4.051.200.000.000	42.367.716.434	51.554.911.894	319.424.821.000	19.058.200.000
2013	Kota. Pasuruan	4.315.100.000.000	66.110.651.059	46.163.342.634	353.127.853.000	25.890.580.000
2014	Kota. Pasuruan	4.561.100.000.000	100.647.029.803	52.592.541.564	391.843.124.000	28.041.850.000
2015	Kota. Pasuruan	4.813.300.000.000	114.734.243.910	52.331.112.233	399.095.322.000	32.176.832.000
2016	Kota. Pasuruan	5.076.400.000.000	147.818.815.719	51.513.313.785	432.090.225.000	92.343.651.395
2012	Kota. Mojokerto	3.358.400.000.000	53.439.861.756	54.904.848.712	309.102.871.000	15.463.900.000
2013	Kota. Mojokerto	3.566.700.000.000	74.944.029.536	45.381.463.215	354.452.407.000	19.389.310.000
2014	Kota. Mojokerto	3.774.500.000.000	105.277.492.018	39.502.270.641	380.779.789.000	18.556.553.000
2015	Kota. Mojokerto	3.991.100.000.000	129.258.132.763	50.992.997.791	382.373.637.000	24.089.454.000
2016	Kota. Mojokerto	4.221.500.000.000	152.462.202.065	55.436.957.047	397.094.498.000	103.285.607.000
2012	Kota. Madiun	6.937.700.000.000	72.030.950.610	60.299.813.832	413.003.782.000	20.273.450.000
2013	Kota. Madiun	7.470.700.000.000	96.011.481.200	54.983.424.555	474.093.362.000	27.544.290.000
2014	Kota. Madiun	7.965.500.000.000	134.584.344.293	62.203.043.742	511.089.913.000	31.922.300.000
2015	Kota. Madiun	8.455.400.000.000	164.681.136.058	47.534.167.294	509.817.165.000	39.864.456.000
2016	Kota. Madiun	8.954.700.000.000	173.235.929.828	65.339.045.850	511.375.289.000	140.847.099.356
2012	Kota. Surabaya	265.892.100.000.000	2.279.613.848.833	318.214.603.897	1.061.625.528.000	53.227.560.000
2013	Kota. Surabaya	286.050.700.000.000	2.791.580.050.710	270.937.496.629	1.160.025.693.000	29.928.308.000
2014	Kota. Surabaya	305.957.300.000.000	3.307.323.863.978	267.630.863.545	1.200.889.359.000	19.854.669.000
2015	Kota. Surabaya	324.227.800.000.000	4.035.649.478.398	230.261.248.683	1.147.385.486.000	7.125.690.000
2016	Kota. Surabaya	343.652.600.000.000	4.090.206.769.388	412.788.910.654	1.233.380.404.000	294.850.212.000
2012	Kota. Batu	7.473.600.000.000	38.794.059.670	50.113.541.744	324.768.945.000	16.585.720.000
2013	Kota. Batu	8.018.600.000.000	59.544.940.728	48.793.825.437	374.362.261.000	23.431.815.000
2014	Kota. Batu	8.572.100.000.000	80.493.920.959	59.265.138.265	412.378.255.000	30.351.360.000

2015	Kota. Batu	9.145.900.000.000	104.233.584.925	49.212.551.211	413.219.693.000	41.314.385.000
2016	Kota. Batu	9.750.900.000.000	1.095.333.498.034	51.317.087.281	480.460.016.000	93.063.615.752

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2017 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsinsi Jawa Timur 2017,
(data dioalah)



LAMPIRAN G. HASIL UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	171.805035	(37,148)	0.0000
Cross-section Chi-square	718.785441	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOGY

Method: Panel Least Squares

Date: 05/27/18 Time: 00:08

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-22.86562	1.890390	-12.09572	0.0000
LOGX1	0.592761	0.053306	11.11997	0.0000
LOGX2	0.459481	0.069970	6.566804	0.0000
LOGX3	0.824034	0.135255	6.092428	0.0000
LOGX4	-0.214434	0.051316	-4.178732	0.0000
R-squared	0.797093	Mean dependent var		9.855819
Adjusted R-squared	0.792705	S.D. dependent var		0.959871
S.E. of regression	0.437025	Akaike info criterion		1.208312
Sum squared resid	35.33336	Schwarz criterion		1.293760
Log likelihood	-109.7896	Hannan-Quinn criter.		1.242926
F-statistic	181.6866	Durbin-Watson stat		0.318120
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN H. HASIL UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	106.687482	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOGX1	0.082468	0.090811	0.000149	0.4949
LOGX2	0.061624	0.200238	0.000291	0.0000
LOGX3	0.305948	0.470015	0.003021	0.0028
LOGX4	0.034009	0.010184	0.000006	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOGY

Method: Panel Least Squares

Date: 05/27/18 Time: 00:10

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.264657	2.144813	0.123394	0.9020
LOGX1	0.082468	0.030949	2.664630	0.0086
LOGX2	0.061624	0.044361	1.389135	0.1669
LOGX3	0.305948	0.118197	2.588446	0.0106
LOGX4	0.034009	0.011551	2.944255	0.0038

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995383	Mean dependent var	9.855819
Adjusted R-squared	0.994104	S.D. dependent var	0.959871
S.E. of regression	0.073701	Akaike info criterion	-2.185296
Sum squared resid	0.803921	Schwarz criterion	-1.467532
Log likelihood	249.6031	Hannan-Quinn criter.	-1.894540
F-statistic	778.2907	Durbin-Watson stat	1.576903
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN I. HASIL REGRESI *MODEL FIXED EFFECT*

Dependent Variable: LOGY
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/27/18 Time: 00:11
 Sample: 2012 2016
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.264657	2.144813	0.123394	0.9020
LOGX1	0.082468	0.030949	2.664630	0.0086
LOGX2	0.061624	0.044361	1.389135	0.1669
LOGX3	0.305948	0.118197	2.588446	0.0106
LOGX4	0.034009	0.011551	2.944255	0.0038

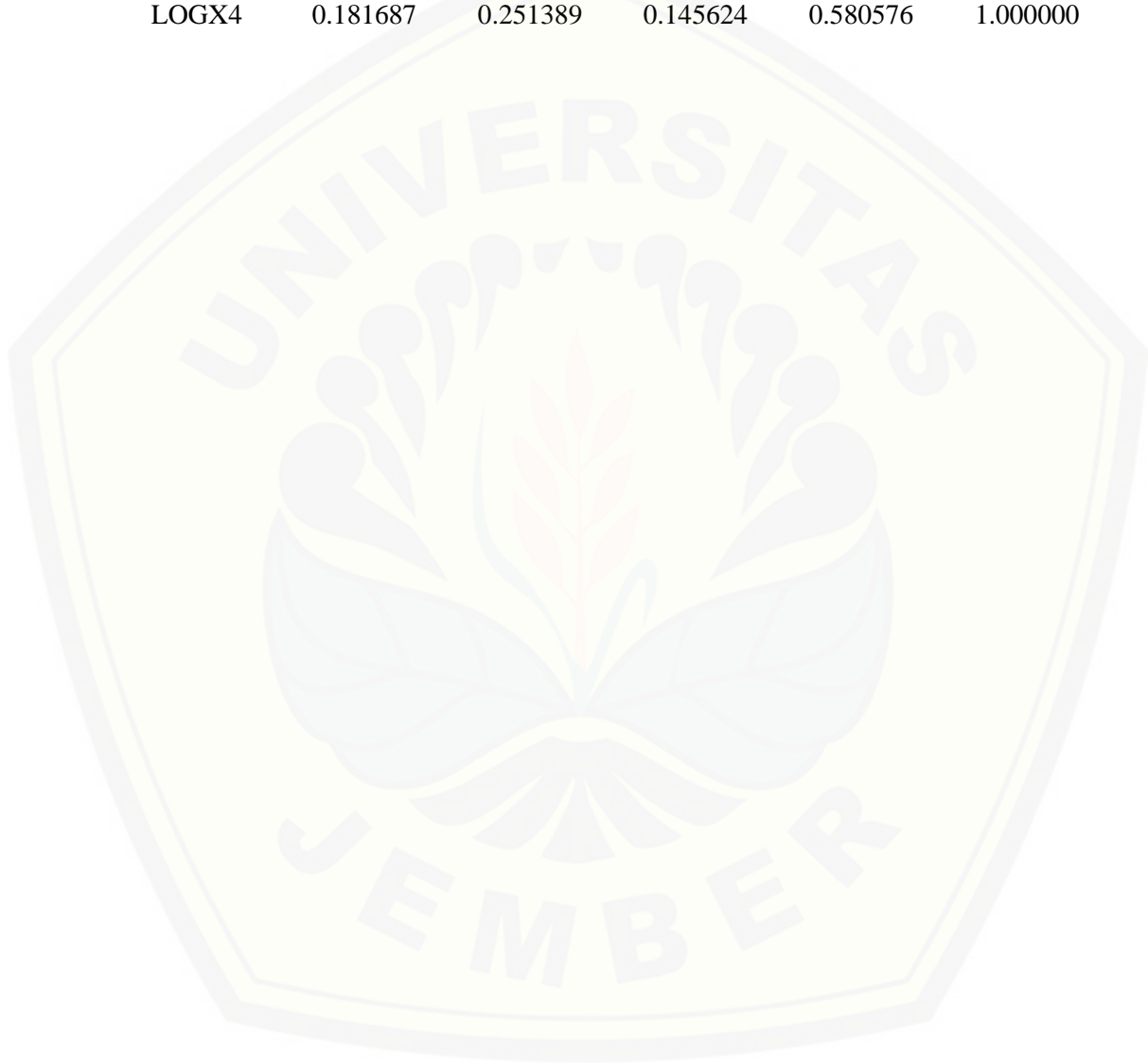
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995383	Mean dependent var	9.855819
Adjusted R-squared	0.994104	S.D. dependent var	0.959871
S.E. of regression	0.073701	Akaike info criterion	-2.185296
Sum squared resid	0.803921	Schwarz criterion	-1.467532
Log likelihood	249.6031	Hannan-Quinn criter.	-1.894540
F-statistic	778.2907	Durbin-Watson stat	1.576903
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN J. HASIL UJI MULTIKOLINERITAS

	LOGY	LOGX1	LOGX2	LOGX3	LOGX4
LOGY	1.000000	0.825753	0.688594	0.673614	0.181687
LOGX1	0.825753	1.000000	0.561918	0.627583	0.251389
LOGX2	0.688594	0.561918	1.000000	0.478204	0.145624
LOGX3	0.673614	0.627583	0.478204	1.000000	0.580576
LOGX4	0.181687	0.251389	0.145624	0.580576	1.000000



LAMPIRAN K. HASIL UJI HEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/27/18 Time: 00:17
 Sample: 2012 2016
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.612063	1.260208	0.485684	0.6279
LOGX1	0.013197	0.018184	0.725747	0.4691
LOGX2	0.019361	0.026065	0.742808	0.4588
LOGX3	-0.062518	0.069448	-0.900217	0.3695
LOGX4	0.004938	0.006787	0.727647	0.4680

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.590932	Mean dependent var	0.025697
Adjusted R-squared	0.477609	S.D. dependent var	0.059914
S.E. of regression	0.043304	Akaike info criterion	-3.248847
Sum squared resid	0.277536	Schwarz criterion	-2.531083
Log likelihood	350.6404	Hannan-Quinn criter.	-2.958091
F-statistic	5.214581	Durbin-Watson stat	1.696903
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN L. HASIL UJI NORMALITAS

